



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

BULETIN VIRAJATI

Media Komunikasi Online Seskoad



**“MENJAGA KETAHANAN
NASIONAL”**



ISSN 2086-9312



9772086931295

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah, Buletin Virajati Seskoad Online edisi ke-5 Februari 2021, kembali terbit sebagai lanjutan dari edisi sebelumnya. Buletin ini merupakan wadah komunikasi dan sharing informasi warga TNI AD, khususnya Seskoad.

Buletin Virajati kali ini mengulas tema "Menjaga Ketahanan Nasional". Kita pahami bahwa Ketahanan Nasional (Tahnas) Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang datang dari luar atau dari dalam negara Indonesia. Ketahanan Nasional sangat dibutuhkan dan harus dijaga untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa, dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Dalam buletin edisi kali ini terdapat tulisan menarik berkaitan dengan tema, antara lain tentang : Penguatan pengamanan wilayah perbatasan, Ketahanan Pangan, Relevansi Ketahanan Nasional dan Ideologi Pancasila menyikapi Era globalisasi. Selain itu, pembaca juga akan menemukan rubrik-rubrik yang dapat menambah wawasan seperti Pengembangan kekuatan Arhanud Kostrad, Peran TNI AD dalam memperkuat strategi pemerintah menghadapi pandemi Covid-19, Bencana dan mitigasinya dalam perspektif Islam, dan sejarah perang dunia beberapa negara, serta beberapa tulisan menarik lainnya.

Akhir kata, kami menyadari masih ada kekurangan dari Buletin ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik pembaca selalu kami nanti, agar kedepannya buletin ini terus eksis, lebih berkualitas dan makin bervariatif. Semoga buletin ini dapat memberikan inspirasi dan sesuatu yang bermanfaat, bagi prajurit TNI AD dan kalangan masyarakat luas. Selamat membaca dan terima kasih.

Pimpinan Redaksi,

BULETIN VIRAJATI

Pelindung

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, M.A.

Pembina

Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si.

Penasihat

Brigjen TNI Marsudi Utomo, S.Sos

Brigjen TNI Drs. Agung Zamani M.Sc.

Pemimpin Redaksi

Kolonel Inf Drs. Paiman

Wakil Pemimpin Redaksi

Kolonel Inf Roy H.J. Sinaga, S.Sos.

Redaktur Pelaksana

Kolonel Chb Muhamad Mukson

Kolonel Inf Singgih Pambudi Arianto, S.I.P., M.M.

Kolonel Czi Dian Hendiana Surachman

Sekretaris Redaksi

Mayor Inf Leo Sugandi, B.A., MMDS.

Staf Redaksi

Mayor Inf Gede Agus Dian Pringgana, S.Sos., MMAS.

Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, S.E., MMAS.

Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos.

Reporter

Letda Inf Khairudin

Fotografer

Serma Winarna

Desain Grafis

Sertu Faizal Ridho Ilhami

Pengatur Muda/ III-A Rendra Boyke, S.Pd., M.Pd.

Alamat Redaksi

Seskoad Jl Jend. Gatot Subroto 96 Bdg

Alamat Email

buletinvirajati@gmail.com

Website

<http://www.Seskoad.mil.id>

Facebook

<https://www.facebook.com/Buletinvirajati>

Istagram

<https://www.instagram.com/Buletinvirajati>

Disclaimer :

- Semua hasil karya yang dimuat dalam "Jurnal Virajati" adalah menjadi hak cipta <http://www.seskoad.mil.id>.
- Tulisan dalam "buletin Virajati" merupakan buah pemikiran dan menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan pandangan organisasi Seskoad.
- Ide dan gagasan berbentuk tulisan essay dapat disampaikan kepada redaksi melalui email Redaksi



"MENJAGA KETAHANAN NASIONAL"

DAFTAR ISI

**PENGUATAN PENGAMANAN WILAYAH
PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR
DI PERBATASAN RI-FILIPINA**

Kolonel Inf Rio Akmal Syahbana, S.H.

4

**PERAN TNI AD DALAM MEMPERKUAT
STRATEGI PEMERINTAH MENGHADAPI
PANDEMI COVID-19**

Kol Inf Yamin

28

**KETAHANAN PANGAN DI
TENGAH PANDEMI COVID-19**

Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si.
(Wakil Komandan Seskoad)

10

**ANALISIS STRATEGI DALAM SEJARAH PERANG
KOREA TAHUN 1950 – 1953 : KEBERHASILAN
STRATEGI PERANG DI INCHEON**

Mayor Inf Ade Sohali

36

**RELEVANSI KETAHANAN NASIONAL &
KETAHANAN IDIOLOGI PANCASILA
DALAM MENYIKAPI ERA GLOBALISASI**

Letkol Kav R. Ponco Suryono, S.H .,M.M.

13

**PEMBINAAN TERRITORIAL DI MASA
DEPAN**

Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.I.P, M.M.

41

**PENGEMBANGAN KEKUATAN
ARHANUD KOSTRAD DALAM
MENGHADAPI PERANG MODERN**

Mayor Arh Helmy Ariansyah

18

**OTIMALISASI PERAN APARAT KODIM DALAM
MENANGANI KONFLIK SOSIAL GUNA
MEWUJUDKAN KEMANUNGGLAN TNI RAKYAT**

Mayor Inf Agus Wicaksono

47

**PANDEMI COVID-19 DAN BENCANA
ALAM SERTA MITIGASINYA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Kolonel Inf Kosasih,,S.E.

22

**UPAYA MEMAJUKAN
PENDIDIKAN PAUD
DI LINGKUNGAN SESKOAD**

Ny. Yani Anton Nugroho Ketua Persit
KCK Cabang Seskoad

52



Kolonel Inf Rio Akmal Syahbana, S.H.

PENGUATAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR DI PERBATASAN RI-FILIPINA

PENDAHULUAN

Sesuai agenda prioritas pembangunan Nawacita Presiden Joko Widodo salah satunya adalah "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Wilayah perbatasan adalah bagian wilayah pinggiran, yang di sisi lain juga merupakan serambi depan negara Indonesia yang menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional saat ini. Namun nyatanya saat ini wilayah perbatasan adalah daerah terbelakang, terpencil dan minim sarana serta prasarana sehingga sangat rentan untuk dikuasai dan dipengaruhi oleh negara lain. Agar wilayah perbatasan tidak dikuasai ataupun dipengaruhi oleh negara asing maka dilakukan upaya penguatan pengamanan perbatasan dan diplomasi militer yang merupakan bagian upaya TNI dalam rangka menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Diplomasi Militer TNI adalah segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan politik luar negeri, dengan menggunakan kekuatan militer TNI, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi serta kebiasaan internasional.

Wilayah perbatasan juga sering menghadapi berbagai permasalahan gangguan keamanan, seperti di perbatasan RI – Filipina wilayah utara pulau Sulawesi, terdapat beberapa permasalahan dan gangguan keamanan antara

lain pelanggaran lintas batas, penyelundupan barang ilegal, illegal fishing, perompakan di laut dan terorisme. Tercatat beberapa kejadian yang menonjol terkait gangguan keamanan di perbatasan RI – Filipina wilayah utara Sulawesi, diantaranya : 1) Pada tanggal 11 September 2017 simpatisan ISIS an. Dicky Maenaku alias Abu Musad ditangkap Tim Densus 88 Polri di Manado saat akan menyebrang ke Filipina; 2) Pada tanggal 10 Maret 2018 WNI an. Mushalla ditangkap di Filipina oleh otoritas Filipina karena terlibat jaringan ISIS yang melalui jalur Jakarta – Manado – Sangihe (RI) – Balut (Filipina) – Gensan (Filipina); 3) Pada tanggal 23 Maret 2020 Sdr. Fandy Richy Kasihua ditangkap Tim gabungan TNI-Polri yang juga melibatkan anggota Denzipur-4/YKN di Manado karena menyelundupkan senjata ilegal ke Papua untuk mendukung kelompok separatis Papua, serta kegiatan illegal fishing dan pelanggaran lintas batas lainnya yang sering terjadi.

Di samping adanya permasalahan dan gangguan keamanan, di wilayah perbatasan juga dipengaruhi oleh sosial ekonomi dan interaksi masyarakat dari negara tetangga terutama masyarakat lokal yang masih memiliki hubungan persaudaraan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan pelanggaran lintas batas dan keluar masuk orang serta barang yang juga harus dikelola dengan baik oleh negara, khususnya oleh instansi pemerintah



Hak Cipta: ANTARA FOTO

terkait yang memiliki kewenangan tersebut. Dengan demikian pengamanan perbatasan, diplomasi militer dan ditunjang oleh kerjasama antar instansi terkait menjadi jembatan bagi penguatan pengamanan dan pembangunan wilayah perbatasan yang tangguh.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa persoalan yaitu Pertama, bagaimana pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar di perbatasan RI-Filipina oleh TNI saat ini. Kedua, bagaimana diplomasi militer yang dilakukan di Perbatasan RI-Filipina di wilayah utara Sulawesi. Ketiga, bagaimana sinergisitas kerjasama antar instansi terkait dalam mengelola wilayah perbatasan RI-Filipina saat ini. Selanjutnya, dianalisa dalam pembahasan permasalahan dengan melihat tinjauan landasan hukum, data dan fakta serta pengalaman penulis selama bertugas di wilayah utara Sulawesi. Berangkat dari identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan permasalahannya yaitu “Bagaimana upaya penguatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar di perbatasan RI-Filipina wilayah utara Sulawesi”.

PEMBAHASAN

Dalam mengamankan wilayah perbatasan dan pulau terluar di perbatasan RI-Filipina, TNI telah menggelar pasukan pengamanan dalam rangka penggunaan kekuatan oleh Mabes TNI yang melibatkan 3 matra TNI. Selanjutnya dibentuk satuan tugas sampai dengan membagi menjadi beberapa Pos TNI secara tersebar di pulau-pulau terluar yang bernilai strategis di bidang pertahanan. Disamping itu juga dilakukan diplomasi militer,

yang merupakan bagian upaya TNI guna menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Namun dalam pelaksanaannya, masih muncul berbagai permasalahan perbatasan yang bukan hanya menjadi domain TNI, tetapi juga melibatkan instansi pemerintah lainnya dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusifitas wilayah di perbatasan RI-Filipina.

Berdasarkan data dan fakta terkait permasalahan dan gangguan keamanan terkait perbatasan seperti pelanggaran lintas batas, penyelundupan barang ilegal, illegal fishing, perompakan di laut dan terorisme sebagaimana disebutkan di atas didapat adanya faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan di wilayah perbatasan RI-Filipina, antara lain terdapat kelemahan yang menjadi kendala baik secara eksternal maupun internal dalam pengamanan wilayah perbatasan RI-Filipina. Sedangkan untuk kendala eksternal diantaranya adalah 1) Luasnya wilayah perbatasan laut dimana wilayah perbatasan laut RI-Filipina terbentang dan memiliki panjang 1.162,2 kilometer yang melintasi Laut Sulawesi dan Laut Filipina; 2) Adanya aktivitas pelintas batas tradisional yang tinggi, khususnya bagi warga keturunan Sanger-Filipina maupun Filipina-Sanger. Diketahui bahwa sejak dahulu warga tersebut memiliki hubungan kekeluargaan, walaupun beda negara. Saat ini tercatat sekitar 1.492 orang warga keturunan Sanger-Filipina (Sapi) maupun Filipina-Sanger (Phisang) dan belum seluruhnya memiliki kewarganegaraan yang jelas; 3) Kerjasama antar instansi terkait dalam pengelolaan kawasan perbatasan masih minim. Sementara faktor internal yaitu 1) Kurang adanya interoperabilitas TNI khususnya sinergisitas antar angkatan/matra; dan 2) Dukungan sarana serta prasarana yang masih minim khususnya bagi petugas di lapangan.

Berikut disampaikan pembahasannya. Pertama, upaya mengatasi masalah penguatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar perbatasan RI-Filipina di wilayah utara Sulawesi terdapat beberapa tinjauan dan analisa antara lain :

- 1) Analisa dari aspek hukum, sesuai UU No.34 tahun 2004 tentang TNI menjelaskan bahwa salah satu tugas OMSP TNI adalah melaksanakan pengamanan perbatasan wilayah NKRI, sehingga sudah seharusnya TNI menggelar pasukan pengamanan di perbatasan sesuai tugas yang diamanatkan dalam UU tersebut. Saat ini wilayah perbatasan laut RI- Filipina terbentang dan memiliki panjang 1.162,2 kilometer yang melintasi Laut Sulawesi dan Laut Filipina, terbagi dua sektor pengamanan wilayah Kotamaops TNI AD yaitu wilayah Kodam XIII/Merdeka dan Kodam VI/Mulawarman. Kemudian satu Kotamaops TNI AL yaitu Koarmada II dan satu Kotamaops TNI AU yaitu Koopsau II. Untuk wilayah pengamanan pulau terluar perbatasan RI- Filipina di wilayah utara Sulawesi dilaksanakan oleh Korem 131/ Santiago selaku Kolakops yang mendapat perkuatan dari satuan teritorial dan satuan tempur jajaran Kodam XIII/Mdk. Sedangkan pengamanan laut perbatasan RI-Filipina dilaksanakan oleh Lantamal VIII/Manado dan jajarannya serta perkuatan dari Koarmada II. Untuk pengamanan udara dilakukan oleh Koopsau II dan jajarannya.
- 2) Analisa dari aspek pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar di utara Sulawesi. Saat ini telah dilaksanakan pengamanan wilayah perbatasan laut, udara dan pulau terluar dengan melibatkan satuan TNI AD, TNI AL dan TNI AU. TNI AD melalui Kolakops Korem 131/Santiago Dam XIII/Merdeka memiliki tugas pokok melaksanakan operasi pengamanan pulau terluar secara terintegrasi dengan satuan TNI AL di daerah operasi pulau Miangas, pulau Marore dan pulau Marampit untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok Koops Kodam XIII/Merdeka. Dimana saat ini tergelar 5 Pos gabungan TNI AD dan TNI AL di pulau terluar perbatasan RI-Filipina dibawah kendali Kolakops Korem 131/Santiago antara lain : a) Pos Pulau Marore, b) Pos Pulau Kawaluso, c) Pos Pulau Miangas, d) Pos Pulau Marampit, dan e) Pos Pulau Kabaruan. Saat ini pelaksanaan kegiatan pengamanan pulau terluar berjalan dengan baik, namun masih belum optimal. Sebagai contoh operasi yang dilaksanakan oleh Kolakops Korem 131/Santiago belum terintegrasi dengan TNI AU dalam pelaksanaan operasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar di perbatasan RI-Filipina wilayah utara Sulawesi. Di sisi lain wilayah perbatasan laut menjadi domain dari TNI AL dan TNI AU dalam hal pengawasan sesuai Alutsista yang dimiliki, sehingga masih ada bagian dalam hal operasional yang masih belum terkoordinir dengan baik. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya azas interoperabilitas TNI dalam operasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar di perbatasan RI-Filipina wilayah utara Sulawesi. Selain itu, terdapat permasalahan dukungan sarana dan prasarana seperti rumah jaga dan pos pengamanan, angkutan laut untuk logistik dan patroli serta dukungan udara masih minim, sehingga perlu adanya dukungan dan perkuatan agar kegiatan operasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Upaya yang dilakukan adalah mengintegrasikan kekuatan TNI dalam operasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar RI-Filipina oleh Mabes TNI sesuai azas interoperabilitas melalui organisasi yang baru dibentuk yaitu Kogabwilhan.
- Kedua, upaya penguatan wilayah perbatasan melalui diplomasi militer terdapat beberapa tinjauan dan analisa, yakni :
- 1) Analisa dari aspek hukum bahwa sesuai amanat UUD 1945 bahwa Indonesia mengambil kebijakan politik luar negeri bebas aktif sehingga Indonesia dapat turut berpatisipasi aktif dalam menciptakan wilayah kawasan perbatasan yang kondusif tanpa ada campur tangan negara lain.
 - 2) Analisa dari aspek operasional, sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor 441/2018 tentang Blue Print diplomasi militer TNI 2019-2024 menjelaskan bahwa prioritas 1 dalam matrik level hubungan TNI dengan

negara sahabat adalah comprehensive strategic partnership yaitu negara-negara di ASEAN yang berbatasan langsung dengan wilayah NKRI. Diharapkan kegiatan diplomasi militer yang dilakukan dapat mewujudkan hubungan yang baik dan saling pengertian dalam hal menyikapi dan menyelesaikan permasalahan perbatasan wilayah dengan negara sahabat dalam hal ini Filipina. Upaya yang dilakukan dalam penguatan diplomasi militer adalah :

1) Memberdayakan perwakilan militer di negara Indonesia dan Filipina, dimana sesuai azas reciprocal dan kesepakatan pertemuan KTT 1974 tentang perjanjian perbatasan dan lintas batas RI-Filipina telah ditempatkan perwakilan militer di tempat maupun pos lintas batas antar negara antara lain negara Filipina menempatkan perwakilan militernya di Indonesia : a) LO di Manado (Sulut-Indonesia), b) LO di Pulau Miangas (Sulut-Indonesia), c) LO di Pulau Tarakan (Kaltara-Indonesia) dan d) LO di Pulau Marore (Sulut-Indonesia) sedangkan Indonesia menempatkan perwakilan militernya : a) LO di Davao (Filipina), b) LO di Tibaban (Filipina), c) LO di Batuganding (Utara Pulau Miangas di wilayah Filipina) dan d) LO di Bongao (Utara Pulau Nunukan di wilayah Filipina). Dengan adanya penempatan perwakilan LO (Liasion Officer) di negara Filipina dan Indonesia sangat membantu dalam hal koordinasi, pertukaran informasi intelijen serta membantu penanganan permasalahan yang berkaitan perbatasan dan warga negara baik Indonesia dan Filipina. Selama ini kegiatan tersebut sudah berjalan baik namun perlu adanya relokasi dan peninjauan ulang penempatan LO khususnya mendekat ke pos lintas batas maupun tempat keluar masuknya pelintas batas negara.

2) Mengadakan pertemuan rutin perbatasan RI dan Filipina yaitu merupakan pertemuan perwakilan Republik Indonesia-Republik Filipina yang dilaksanakan secara rutin, sekali dalam

setahun dan membahas tentang pelintas batas tradisional serta implementasi teknis patroli perbatasan. Terakhir sidang tingkat Ketua Komite Perbatasan Republik Indonesia - Republik Filipina Ke -38 Tahun 2019 (38th Republic of Indonesia - Republic of Philippines Border Committee Chairmens Conference), dilaksanakan di Waterfront Insular Hotel, Davao City, Filipina pada bulan November 2019 dihadiri oleh Panglima Koarmada II Laksda TNI Heru Kusmanto sebagai Ketua Delegasi Indonesia dan Eastern Mindanao Command Commander Lieutenant General Felimon T. Santos sebagai Ketua Delegasi Filipina. Kegiatan pertemuan ini sudah dimulai sebelumnya, antara Indonesia dan Filipina pada tanggal 4 Juli 1956 dalam bidang ekonomi berupa persetujuan lintas batas (Border Cross Agreement). Kemudian pada 11 Maret 1975, dikembangkan melalui perjanjian dan patroli perbatasan antara Indonesia dan Filipina yang ditandatangani dengan mengembangkan kesepakatan melalui Border Patrol Agreement dan Border Crossing Agreement sebagai revisi atas kesepakatan sebelumnya yang selanjutnya pertemuan dilaksanakan secara rutin, yang saat ini didelegasikan kepada petinggi TNI dan militer Filipina. Adapun tujuan dari pelaksanaan sidang tahunan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama keamanan antara Filipina dan Indonesia pada permasalahan keamanan yang berada di wilayah perbatasan serta menjaga hubungan harmonis kedua negara. Adapun beberapa komitmen atau kesepakatan yang telah dihasilkan dari sidang terakhir, adalah : 1) Kedua pihak setuju untuk melanjutkan penggunaan Kartu Lintas Batas untuk bepergian di sekitar wilayah perbatasan serta membentuk Technical Working Group di masing-masing komite dalam mengkaji penggunaan paspor sebagai pengganti Kartu Lintas Batas, 2) Untuk meningkatkan pelaksanaan Komite Perbatasan sesuai fungsinya, kedua Komite sepakat untuk mengadakan kembali Rapat Pendahuluan yang dipimpin Wakil Ketua Komite Perbatasan dan membagi sub komite menjadi 3 sub komite dengan keterangan Sub Komite A Patroli

Perbatasan dan Komunikasi, Sub Komite B Intelijen, Sub Komite C Manajemen Lintas Perbatasan, 3) Kedua komite juga sepakat untuk menentukan standar keamanan bagi moda transportasi pendukung pelintas batas berdasarkan aturan keselamatan yang berlaku di tiap negara, 4) Terkait masalah transportasi, Indonesia dan Phillipina telah meningkatkan perkembangan ekonomi antar negara melalui peresmian rute Manado - Davao oleh Maskapai Garuda pada tahun 2019, 5) Terkait pelaksanaan patroli perbatasan, antara Indonesia dan Phillipina sepakat untuk meningkatkan fungsi Pos Lintas Batas dengan penempatan personel imigrasi, bea cukai dan karantina, serta meningkatkan intensitas patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan dan membuat Standar Operation Procedure sebagai pedoman patrol, 6) Terakhir kedua komite sepakat untuk mematuhi Konvensi Vienna dan International Covenant on Civil and Political Right dan menyampaikan ke konsulat terdekat perihal penahanan warga negaranya. Selanjutnya hasil pertemuan tersebut dilaporkan kepada Mabes TNI dan Kementerian terkait khususnya Kementerian Luar Negeri untuk ditindaklanjuti.

3) Upaya meningkatkan sinergitas dan kerjasama antara instansi berwenang di wilayah perbatasan. Kerjasama instansi terkait di wilayah perbatasan maupun pos lintas batas negara bahwa masalah terkait keluar dan masuk orang serta barang baik dari dalam dan keluar negeri dibutuhkan kerjasama antar instansi terkait di wilayah perbatasan dan pos lintas batas. Kerjasama antara instansi di kawasan perbatasan dan pos lintas batas saat ini masih lemah serta kurang terkoordinir dengan baik. Terdapat beberapa tinjauan dan analisa antara lain :

a) Ditinjau dari aspek hukum, terdapat beberapa instansi yang berwenang yang berhubungan dengan kawasan perbatasan dan pos lintas batas negara antara lain : (1) Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), sesuai UU No.43 tahun 2008 tentang wilayah negara bahwa BNPP adalah lembaga nonsruktural di bawah presiden yang bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dan melaksanakan

evaluasi serta pengawasan di kawasan perbatasan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri RI, (2) Imigrasi, sesuai UU No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa tugas keimigrasian terkait hal ikwal lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka tegaknya kedaulatan negara Indonesia dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, (3) Bea dan Cukai, sesuai UU No.17 tahun 2006 memiliki tugas terkait Kepabeanan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar dibawah Kementerian Keuangan RI, (4) Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau Coast Guard, sesuai UU No.17 tahun 2008 tentang pelayaran bahwa penjaga laut dan pantai (sea and coast guard) dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI dan (5) Karantina, sesuai UU no.1 tahun 1962 tentang karantina laut dimana harus dilakukan pemeriksaan kesehatan di pelabuhan laut terhadap penyakit karantina kapal.

b) Ditinjau dari hasil evaluasi dan pertemuan antara Indonesia dan Filipina, ternyata pengamanan perbatasan banyak menemui permasalahan yang tidak hanya domain masalah militer kedua negara saja, namun juga terkait dengan instansi lainnya yang berwenang dalam rangka pengawasan, pengamanan, penegakan hukum dan menjaga kedaulatan negara. Beberapa hal permasalahan yang diangkat terkait kewenangan di luar TNI antara lain : (1) Mengkaji penggunaan paspor sebagai pengganti Kartu Lintas Batas, (2) Penambahan Sub Komite C perbatasan yang membahas tentang Manajemen Lintas Perbatasan, (3) Penentuan standar keamanan bagi moda transportasi pendukung pelintas batas berdasarkan aturan keselamatan yang berlaku, (4) Meningkatkan fungsi Pos Lintas Batas dengan penempatan personel imigrasi, bea cukai dan karantina, (5) Menyampaikan ke konsulat terdekat perihal penahanan warga negara RI maupun Filipina. Upaya yang dilakukan adalah perlu adanya sinergi dalam pengamanan dan pengelolaan lintas batas negara serta kawasan perbatasan

dengan melakukan pertemuan rutin antar instansi terkait pemerintah Indonesia sehingga kesepakatan antar negara RI-Filipina dapat berjalan dan dapat mengatasi masalah perbatasan dan pos lintas batas antar kedua negara.

Penutup.

Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar di perbatasan RI-Filipina wilayah utara Sulawesi saat ini belum optimal khususnya kerjasama antar matra TNI sesuai azas interoperabilitas TNI,
- b. Pertemuan rutin tahunan antara Indonesia dan Filipina dan penempatan perwakilan LO (Liasion Officer) adalah upaya diplomasi militer yang berkelanjutan untuk meningkatkan kerjasama keamanan di perbatasan serta tetap menjaga hubungan harmonis kedua negara,
- c. Permasalahan perbatasan ternyata tidak saja menjadi permasalahan bagi TNI saja, namun juga menyangkut instansi terkait lainnya yang berwenang dalam upaya mengelola kawasan perbatasan menjadi wilayah yang tangguh.

Saran.

- a. Meningkatkan peran interoperabilitas TNI dalam pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar dengan memberdayakan organisasi baru Kogabwilhan, sehingga dapat mengintegrasikan dan menutup celah kekurangan pelaksanaan operasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar,
- b. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait di perbatasan untuk mewujudkan wilayah perbatasan yang tangguh dengan memberdayakan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) sebagai leading sector. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) sebagai leading sector melakukan pertemuan rutin dan evaluasi dengan mengundang instansi terkait pemerintah Indonesia yang berwenang di kawasan



Uploaded by: Republik Merdeka TV, Jun 6, 2017

perbatasan RI-Filipina, sehingga hasil kesepakatan kedua negara dapat diimplementasikan dan memberikan hasil yang positif bagi kawasan perbatasan. Demikian tulisan upaya penguatan wilayah perbatasan dan pengamanan pulau terluar di perbatasan RI-Filipina wilayah utara Sulawesi, semoga mampu meningkatkan profesionalisme TNI, yang menjadi kebanggaan bangsa, demi kejayaan NKRI.



<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mastimon.com>

Kolonel Inf Rio Akmal Syahbana, S.H., merupakan Abituren Akmil 1997 dan lulusan Dikreg LI Seskoad tahun 2013, Saat ini menjabat sebagai Dosen Madya seskoad.



Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si. (Wakil Komandan Seskoad)

KETAHANAN PANGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19

"Kemuliaan berkebun: tangan di tanah, kepala di bawah sinar matahari, hati dengan alam. Memelihara taman berarti memberi makan tidak hanya pada tubuh, tetapi jiwa."
(Alfred Austin).

PENGANTAR

Menghadapi pandemi Covid-19 yang belum kunjung berakhir dengan korban yang semakin meningkat tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan status sosial telah memporak-porandakan sendi-sendi ekonomi dan merusak tata kelola pangan dunia. Tentu Covid juga menerpa lembaga pendidikan Seskoad baik keluarga maupun kesatuan. Kita ketahui bahwa jumlah penderita Covid meningkat tajam, rumah sakit penuh, Bandung dan Jakarta termasuk wilayah zona merah hitam. Di Seskoad sendiri terdapat beberapa anggota organik dan keluarga yang terkena Covid-19 dan diisolasi di mess dan tempat khusus yang disiapkan bagi para penderita. Bagi anggota keluarga yang menderita sakit kronis dan rawan terhadap Covid-19 selalu dianjurkan untuk menjaga kesehatannya. Pemberlakuan protokol kesehatan tentu ditempuh untuk mencegah menularnya Covid-19 bagi anggota keluarga maupun personel lainnya.

Untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19, pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah strategis secara nasional. Sebagai implikasi langkah dalam mencegah meluasnya wabah COVID-19 dianjurkan untuk selalu menjaga jarak sosial (social distance), tetap tinggal di rumah (stay home), kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah di rumah,

dan sekarang tengah menyiapkan karantina kewilayahan (lockdown) atau membatasi perpindahan orang. Yang sangat krusial dan menjadi problem adalah bagaimana negara (pemerintah) mampu untuk menjamin ketersediaan pangan secara nasional maupun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, utamanya untuk rumah tangga miskin dan yang kurang beruntung. Untuk mencukupi kebutuhan pangan tersebut, Senator Fadel Muhammad, anggota MPR RI mengingatkan pemerintah bahwa pencegahan dan pengobatan secara medis tidaklah cukup, tetapi harus diikuti dengan kebijakan mendasar, yaitu bagaimana memperkuat ketahanan pangan rumah tangga sebagai fokusnya, bukan pada tataran nasional, yang meliputi ketersediaan yang cukup untuk masa tertentu dan keterjangkauan (harga yang layak), terutama untuk keluarga miskin yang berjumlah 9,22% (BPS, September 2019), tersebar di perkotaan (6,56% atau 9,86 juta) dan daerah pedesaan



Uploaded by: Pensekoad

12,60% atau 14,93 juta yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Tentu hal ini sangat krusial karena pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa krisis politik didahului oleh krisis ekonomi akibat krisis pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan suatu negara terkait erat dengan dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan pertahanan keamanan.

Ketahanan pangan diartikan sebagai sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan (sustainable). ² Maka yang menjadi subsistem ketahanan pangan adalah penyediaan pangan, distribusi, dan konsumsi yang ketiganya saling mempengaruhi secara berkesinambungan. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, agar dari sisi ketersediaan (terutama produksi dalam negeri kita utamakan), distribusi dan konsumsinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Artinya, dari sisi penyediaan atau produksi dalam negeri, kita menyelamatkan rumah tangga petani sebagai produsen pangan. Dari aspek distribusi (transportasi), tidak terlalu jauh dan konsumsi pun terjangkau (dengan harga yang layak). Untuk menghitung berapa ketersediaan pangan pokok, terutama beras pemerintah pun akan mengalami kesulitan karena tidak tahu sampai kapan wabah Corona akan berakhir. Bisa 18 bulan bisa lebih untuk menemukan vaksin bagi virus Covid-19 tersebut. Paling tidak kita turut berpikir dan berpartisipasi aktif dalam turut penyediaan ketersediaan pangan di rumah tangga kita masing-masing.

Salah satu peran serta masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan adalah dengan melakukan

peningkatan kemandirian pangan rumah tangga. ³ Memperhatikan situasi yang sedang berkembang khususnya ancaman terhadap penyebaran Covid-19 di lingkungan

Seskoad, dan keprihatinan terhadap ancaman kelangkaan dan ketersediaan pangan bagi rumah tangga miskin dan kita sebagai warga bangsa, maka kita terinspirasi untuk menanam kebutuhan pangan di lingkungan Perumahan Seskoad dengan memanfaatkan tanah yang ada. Adanya lahan yang cukup untuk ditanami dengan berbagai tanaman sayuran dan kebutuhan hidup lainnya maka lahirlah gagasan untuk mencanangkan "Seskoad gemar menanam" dengan cara berkebun di lingkungan kita terutama di sekitar rumah dinas masing-masing.



Uploaded by: Penseskoad

Seskoad berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan pokok bagi prajurit dan keluarganya dengan program ketahanan pangan, yang diwujudnyatakan dengan kegiatan menanam di kebun masing-masing baik di lingkungan rumah tinggal maupun lingkungan perkantoran Seskoad. Hal ini dimaksudkan agar mengurangi interaksi prajurit dan keluarganya dengan orang lain sehingga mengurangi kemungkinan tarpapar dan tertular penyakit COVID-19 yang sangat mematikan ini.

Seskoad juga menghadirkan ahli pertanian yang sudah malang-melintang dan telah

¹Fadel Muhammad, Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Tengah Badai Corona, Warta Ekonomi.co.id, Jumat, 03 April 2020, pukul 22.02 WIB.

²UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dari Jogloabang, Jumat, 29-05-2020 pukul 03.12

³Ibid, Pasal 130 ayat 2f Peran Serta Masyarakat.

berhasil menjadi inspirasi bagi petani dan prajurit lainnya serta sukses mengembangkan pertanian buah-buahan, sayuran, dan lainnya yakni Serda Mugiyanto dengan kebun klengkeng-nya untuk memotivasi segenap organik Seskoad akan pentingnya berkebun.



Uploaded by: Penseskoad

Seskoad telah mencanangkan penanaman 500 pohon buah meliputi jambu kristal, mangga herojaka, jambu Madu Deli, dan rambutan rapiah sehingga kawasan Seskoad akan menjadi lebih asri dan produktif. Layaknya manusia, tanaman juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang agar dapat berkembang biak dan menghasilkan. Kasih sayang itu ditunjukkan dengan menyirami, memberi pupuk dan nutrisi yang cukup, membersihkan dari rumput liar/gulma, mengobati ketika sakit/terserang hama. Bahkan sebenarnya ada anjuran untuk mengajak tanaman kita berbicara mengenai hal-hal yang positif. Mereka memang tidak mungkin berbicara mengeluarkan kata-kata jawaban, namun mereka merespon baik dengan tumbuh sehat, segar, dan subur. Karena menanam itu ternyata mendatangkan banyak manfaat bagi diri pribadi maupun bagi lingkungan sekitar.



Uploaded by: Penseskoad

⁴ Kebutuhan pangan harus tersedia kapan pun dan di mana pun, apalagi di tengah Pandemi Covid-19 yang memerlukan asupan makanan dan gizi yang cukup sehingga tubuh prajurit akan selalu prima dan siap menjalankan tugasnya. Geliat pertanian di negeri ini tidak boleh redup, walau dikerjakan dari rumah tangga masing-masing. Sampai kapan pun dan dalam keadaan bagaimana pun sektor pertanian sebagai salah satu garda terdepan dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini harus menjadi prioritas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Uploaded by: Penseskoad



Uploaded by: Penseskoad

Brigjen TNI, Fulad, S.Sos., M.Si. merupakan Abituren Akmil 1990 dan lulusan Dikreg Seskoad tahun 2004, dan Lemhannas RI tahun 2016. Saat ini menjabat sebagai Wadan Seskoad.

⁴https://salimas_citra.co.id/ternyata-tanaman-juga-butuh-kasih-sayang/



Letkol Kav R.Ponco Suryono, SH., M.M

RELEVANSI KETAHANAN NASIONAL DAN KETAHANAN IDIOLOGI PANCASILA DALAM MENYIKAPI ERA GLOBALISASI

Pendahuluan.

Seiring perkembangan era globalisasi yang ditandai dengan isu demokratisasi, penegakan hukum, HAM, dan terorisme serta dampak negatif penyebaran virus COVID-19, maka ketahanan nasional sangat diperlukan bagi sendi kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan tuntutan tersebut, Ketahanan Nasional sebagai Doktrin Nasional dan landasan konsepsional serta sebagai pola dasar pembangunan nasional, kebijaksanaan dan strategi nasional menjadi sangat penting untuk dilakukan secara maksimal. Dilihat dari konsepsi ketahanan nasional sebagai Doktrin Nasional pada hakekatnya adalah suatu ajaran atau konsensus bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dan wawasan nusantara guna menjamin satu pola berpikir, pola tindak dan pola sikap guna mempersatukan usaha bersama yang bersifat intersektoral dan multidisipliner yang memerlukan suatu keterpaduan bersama di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya merupakan kajian dari teori dan pengalaman yang dibangun melalui proses penalaran dan merupakan sarana untuk meningkatkan kondisi kehidupan nasional Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan

mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengembangkan kehidupannya demi kejayaan bangsa dan negara yang mencakup segenap aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam Astagatra, yang terdiri dari Trigatra (Gatra geografi, demografi dan sumber daya alam) dan Pancagatra (Ideologi, Politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam).

Konsepsi ketahanan nasional sebagai fungsi pola dasar pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan arah pedoman dari setiap pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan adanya ketahanan nasional maka setiap rencana sektoral selalu dapat diarahkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari maksud tujuan semula yaitu falsafah Pancasila dan UUD 1945. Konsepsi ketahanan nasional sebagai fungsi sistem nasional Indonesia juga merupakan pola dasar masyarakat Indonesia dimana falsafah Pancasila dan UUD 1945 diterapkan didalamnya dan dapat digunakan untuk membandingkan antara cita-cita dengan hasil kegiatan atau perjuangan bangsa dari waktu ke waktu.

Saat gelombang globalisasi melanda dunia dapat dikatakan bahwa perbatasan antar negara menjadi transparan dan mengabur, dapat dirasakan polarisasi Timur dan Barat

yang demikian cepatnya hilang seolah tak berbekas dan seperti tiba-tiba pula muncul polarisasi Utara dan Selatan yang secara mengejutkan menjadi issue antar bangsa. Menghadapi gejala seperti itu banyak pendapat yang mempersepsikan seolah-olah zaman ideologi berakhir berganti dengan zaman ekonomi global. Akibatnya banyak negara berkembang berada di persimpangan jalan untuk mempedomani kebenaran ideologi yang telah dianut sebelumnya.

Perkembangan dunia yang begitu cepatnya tidak terlepas dari adanya keterbukaan informasi dan teknologi, kebebasan berpendapat dan kondisi ketahanan Nasional yang dimiliki masing-masing bangsa yang berbeda. Indonesia yang memiliki ideologi terbuka yaitu Pancasila tentunya tak luput mengalami hembusan gelombang sehingga terjadilah perubahan era seperti saat ini yaitu era globalisasi. Era globalisasi telah membawa perubahan-perubahan yang mendasar pada tatanan pemerintahan Indonesia termasuk adanya amandemen pada batang tubuh UUD 45, bahkan ada upaya dari kelompok masyarakat tertentu untuk mengubah UUD 45 dengan UUD yang baru.

Dari latar belakang permasalahan yang telah disampaikan diatas maka dapat ditemukan beberapa persoalan yang harus dipecahkan yaitu :

- 1. Bagaimana relevansi Ideologi Pancasila dalam menyikapi gelombang globalisasi ditinjau dari segi keterbukaan informasi dan teknologi serta dari segi kebebasan berpendapat ?;**
- 2. Bagaimana relevansi Ketahanan Nasional Indonesia menyikapi Era globalisasi tersebut ?**

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Komando atas tentang relevansi Ketahanan Nasional dan Idiologi Pancasila di era globalisasi yang ditinjau dari segi keterbukaan informasi dan teknologi serta segi kebebasan berpendapat dan upaya menyikapinya.

Pembahasan.

Untuk menjawab persoalan pertama, yakni relevansi Ideologi Pancasila dalam menyikapi gelombang globalisasi ditinjau dari segi keterbukaan informasi, segi kebebasan berpendapat maka ada baiknya dipahami dahulu tentang ketahanan Ideologi Pancasila.

Ketahanan Nasional Indonesia di bidang ideologi adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia memiliki 5 (lima) unsur yaitu sila-sila sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai ini merupakan kesatuan yang bulat dan utuh karena masing-masing nilai tidak dapat dipahami dan diberi arti secara terpisah dari keseluruhan nilai lainnya. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak identik dengan agama tetapi berkaitan dengannya. Nilai Ketuhanan yang maha Esa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk dan pengikut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk berkembang dengan subur, rukun dan damai. Nilai ini berfungsi sebagai kekuatan mental-spiritual di dalam Ketahanan Nasional. Dalam nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab tersimpul nilai persamaan derajat, persamaan kewajiban dan hak, cinta-mencintai, hormat-menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan nilai gotong-royong. Nilai Persatuan Indonesia dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik ini merupakan faktor pengikat yang menjamin persatuan nasional.

Nilai ini menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Persatuan nasional merupakan unsur utama bagi bangsa yang ingin maju. Nilai kerakyatan dijelmakan oleh persatuan nasional yang riil dan wajar dimana kedaulatan berada ditangan rakyat (demokrasi). Nilai ini mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, musyawarah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Demokrasi tanpa pimpinan dapat menjelma menjadi anarki dan pimpinan tanpa demokrasi dapat mengarah kediktatoran dan totaliter. Karena itu perlu diciptakan keseimbangan antara kepemimpinan dan kerakyatan. Nilai Keadilan Sosial menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan merata. Dalam nilai ini tersimpul sikap adil, menghormati hak orang lain dan sikap kegotong-royongan.

Pancasila tidak hanya merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga merupakan dasar negara Republik Indonesia yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagai jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia, Pancasila memberikan corak dan ciri khas kepada Bangsa Indonesia.

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia memiliki relevansi dengan era keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat. Dalam nilai-nilai Pancasila sudah tertuang nilai kebebasan individu yang dijamin oleh pemerintah dalam hal kehidupan beragama, persamaan hak dengan tidak mendiskriminasi kan suku, agama, dan ras serta terjaminnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan merata. Selain itu dalam nilai – nilai Pancasila tertuang juga nilai kerakyatan yang mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, musyawarah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai

kebenaran dan keadilan. Namun demikian, memiliki ideologi Pancasila yang sempurna dan cocok belum menjamin Ketahanan Nasional bangsa Indonesia di bidang ideologi. Untuk mencapai Ketahanan Nasional di bidang ini diperlukan penghayatan dan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuensi, baik obyektif maupun subyektif. Pelaksanaan obyektif yaitu bagaimana pelaksanaan nilai-nilai dalam ideologi itu dalam Undang-Undang Dasar dan segala peraturan perundang-undangan di bawahnya serta segala kegiatan penyelenggaraan Negara, sedangkan pelaksanaan subyektif adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara.

Selanjutnya, untuk menjawab persoalan kedua, yakni bagaimana relevansi Ketahanan Nasional Indonesia menyikapi globalisasi perlu dibahas tentang Ketahanan Nasional itu sendiri. Ketahanan Nasional Indonesia merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional Indonesia. Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus menerus dan sinergi, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional, bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi

bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Pada dasarnya Konsepsi Tahnas (Indonesia) memberikan umpan balik pada Pola Operatif pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan didalam kehidupan nasional, yaitu :

- a. Pengaturan dan penyelenggaraan aspek-aspek kehidupan nasional (Gatra) dilaksanakan secara utuh menyeluruh (komprehensif-integral).
- b. Pengaturan dan penyelenggaraan aspek-aspek kehidupan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.
- c. Pengaturan dan penyelenggaraan aspek-aspek kehidupan dilaksanakan berdasarkan kondisi riil, hakekat tantangan dan ancaman, serta berorientasi pada tujuan nasional. Karena itu, diperlukan apresiasi yang tepat.
- d. Setiap aspek kehidupan nasional (Gatra) harus dilihat sebagai sumber kekuatan nasional. Konsepsi Tahnas Indonesia yang berpedoman pada Wawasan Nusantara pada hakekatnya merupakan konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan didalam kehidupan nasional, bangsa dan negara Indonesia. Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan yang hendak dicapai untuk mewujudkan Tahnas Indonesia dapat digambarkan sebagai kemampuan Bangsa dan Negara Indonesia untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Sedang pengaturan dan penyelenggaraan keamanan yang mewujudkan Tahnas Indonesia dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melindungi nilai-nilai itu terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar.

Dalam menyikapi globalisasi di era saat ini dalam rangka ketahanan nasional telah disusun strategi guna pelaksanaan ketahanan Nasional antara lain :

1) Strategi di bidang ketahanan Ideologi.
Yaitu dengan : a) Pengembangan Wawasan Nusantara. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk wawasan yang memandang kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan perlu dikembangkan. b) Pembangunan yang merata dan seimbang. Kondisi geografi Indonesia

mengharuskan dan mewajibkan suatu strategi pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan dan untuk menghindarkan rasa keterpenciran yang dapat dengan mudah menumbuhkan keterasingan dan rasa tidak puas yang akan menghidupkan sparatisme. Pembangunan nasional juga harus menunjukkan keseimbangan antara pembangunan materil fisik dengan pembangunan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme. c) Pendidikan untuk memperkuat Pancasila. Disamping melalui pendidikan moral Pancasila nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya kedalam mata pelajaran lain seperti sejarah Bangsa Indonesia, Kepramukaan, pendidikan moral pancasila juga perlu diberikan kepada masyarakat secara nonformal dan informal.

2) Strategi politik dalam negeri . Dengan melakukan ; a) Pemantapan kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum. b) Pendidikan politik rakyat sehingga tumbuh kesadaran sebagai yang tercantum dalam sikap mental dan pola tingkah laku politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. c) Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia.

3) Strategi politik luar negeri dengan melakukan: a) Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang b) Meningkatkan kerjasama antar bangsa untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. c) Meningkatkan peranan Indonesia di fora internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar bangsa-bangsa demi perdamaian dan ketertiban dunia. d) Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi diantara negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru.

4) **Strategi ekonomi** dengan Pembangunan ekonomi yang harus didasarkan pada demokrasi ekonomi dimana masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Harus dihindari free fight liberalism, etatism dan monopolis. Sasaran yang harus dicapai secara bertahap adalah mengembangkan struktur ekonomi yang seimbang antara pertanian dan industri.

5) **Strategi sosial budaya.** Dengan melakukan: a) Meningkatkan usaha-usaha penghayatan dan pemahaman bahwa perikehidupan beragama adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila, bahwa ajaran-ajaran dan hukum-hukum agama memberikan dasar moralitas dan rintisan jalan kemajuan disamping fungsinya menuntun manusia untuk dunia akhirat. Meningkatkan terus usaha-usaha pembinaan kerukunan hidup umat beragama dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Meningkatkan usaha-usaha pelayanan dalam rangka pengamanan dan penambahan sarana-sarana yang diperlukan bagi kehidupan keagamaan. b) Membina suatu sistem pendidikan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang lebih mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dan mengakomodasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c) Meningkatkan usaha-usaha pembinaan kebudayaan nasional sebagai pengejawantahan manusia Indonesia atas dasar norma-norma Pancasila. d) Meningkatkan usaha-usaha mengatasi masalah kependudukan dengan segala implikasinya demi kelestarian kehidupan manusia dan bangsa secara manusiawi disatu pihak, dan untuk menempatkannya sebagai sumber dan kekuatan Tannas secara kualitatif maupun kuantitatif.

6) **Strategi Hankamneg.** Dengan melakukan : a) Membina Ketahanan Nasional di segala kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dengan antara lain mewujudkan stabilitas dan melaksanakan pembinaan dan pembangunan wilayah nasional. b) Melindungi jalannya pembangunan nasional guna menjamin tercapainya

kepentingan nasional, tujuan-tujuan dan sasaran nasional. c) Membangun kemampuan Pertahanan Semesta dengan meningkatkan kesadaran tanggung jawab, kewaspadaan, kemampuan dan kesiagaan warga negara, masyarakat dan bangsa. d) Membangun TNI yang tangguh, efektif dan efisien dengan kekuatan cadangan yang segera dapat dikembangkan, sepadan dengan tugas yang dihadapkan dalam rangka perwujudan Sishanta dan memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi yang mutakhir yang sedapat mungkin ditunjang oleh industri nasional, khususnya industri pertahanan dan keamanan untuk mencari kemungkinan pembuatan inovasi-inovasi alat dan peralatan untuk masa depan dalam pembangunan, sesuai dengan fungsi yang diemban oleh TNI. e) Memelihara integritas dan kemanunggalan antara komponen-komponen TNI serta kemanunggalan TNI dan rakyat. f) Penyusunan kekuatan Hankamneg yang mampu ikut mewujudkan perdamaian dan keamanan regional di Asia Tenggara khususnya dan dunia pada umumnya.

Penutup.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Ketahanan ideologi Pancasila dalam menyikapi gelombang globalisasi yang ditinjau dari segi keterbukaan informasi , segi kebebasan berpendapat memiliki relevansi yang sangat tepat karena Pancasila sebagai ideologi bangsa didalamnya telah tertuang nilai-nilai ketahanan yang dapat menahan pengaruh negatif dari globalisasi.
- b. Ketahanan Nasional yang pada hakekatnya adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Letkol Kav R Ponco Suryono, S.H, M.M. merupakan Abituren Sepa PK 1996 , Saat ini menjabat sebagai Kabagminjuang dan Doktrin Depjuang dan Doktrin Seskoad.



Major Arh Helmy Ariansyah

PENGEMBANGAN KEKUATAN ARHANUD KOSTRAD DALAM MENGHADAPI PERANG MODERN

Pendahuluan.

Siapa bilang perang bukan lagi opsi yang populer dekade ini? Di tahun 2020 yang diwarnai dengan wabah virus corona ini dunia dihentakkan dengan perang yang meletus antara dua negara yang bertetangga di Laut Hitam, Armenia dan Azerbaijan. Gambaran perang modern yang identik dengan perang teknologi senjata nyata terjadi antara dua negara yang ‘tidak terlalu kaya’ tersebut. Pertempuran antara tank kelas berat, artilery kaliber besar dan roket-roket jarak jauh, serta teknologi combat drone atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle) bersenjata antara pihak-pihak yang berseteru dapat kita temukan rekaman/footage-nya di televisi dan internet. Para pengamat pertahanan dan tentunya angkatan bersenjata dari banyak negara turut serta menurunkan tim observer-nya untuk mempelajari taktik dan teknik bertempur yang dipraktikkan kedua angkatan bersenjata yang bertikai. Tidak ketinggalan para kontraktor industri pertahanan yang juga mencari celah untuk mempromosikan produk-produk terbarunya. Semuanya demi mengejar tuntutan kemajuan teknologi dan kecanggihan strategi serta taktik militer yang efektif di era teknologi informasi. Ya,... semuanya. Tidak terkecuali TNI AD.

Bagi TNI AD, pelajaran tentang perang aktual tersebut kini menjadi objek pembahasan wajib di berbagai Lembaga Pendidikan dan bahan diskusi yang cukup populer di kalangan

perwira. Salah satunya tentang bagaimana kedua negara yang berperang tersebut menggunakan UAV dan Alutsista canggih guna menghancurkan kekuatan tempur dan fasilitas militer lawannya. Lalu, bagaimana dominasi kekuatan udara yang menjadi salah satu tolok ukur keunggulan dalam perang modern diperebutkan oleh kedua pihak. Yang juga sama pentingnya adalah bagaimana kekuatan militer masing-masing negara digelar untuk menghadapi ancaman udara lawan yang dapat menyerang kekuatan darat secara efektif? Apakah kedua pihak menerapkan taktik pertahanan udara yang berbeda, bagaimana perbandingan kekuatan Alutsista masing-masing, serta faktor apa yang menjadi penentu keunggulan kedua seteru dalam perang terbuka yang *head-to-head* ini? Itu semua pertanyaan yang sedang mengemuka di kalangan pakar militer dunia saat ini. Pertanyaan-pertanyaan itu pula yang menjadi bahan renungan para pemangku kepentingan dalam penentuan kebijakan pembangunan kekuatan militer TNI AD di era modern seperti saat ini.

Pembahasan.

Secara umum, strategi pembangunan kekuatan TNI AD disusun sejalan dengan strategi penggunaan kekuatan TNI AD, yaitu dengan kekuatan tersebar yang diwadahi dalam Kodam-Kodam dan kekuatan terpusat dengan Kostrad dan Kopassus sebagai tulang

punggungnya. Kodam berperan strategis dalam pembangunan kekuatan kewilayahan yang disesuaikan dengan karakteristik Sumber Daya Alam, SDM, dan infrastruktur yang ada di daerah. Sedangkan Kostrad dan Kopassus adalah kekuatan pemukul yang sifatnya mobile serta mempunyai daya tempur optimal yang siap diterjunkan di seluruh wilayah tanah air, serta mampu menghadapi semua spektrum ancaman militer. Karena itulah, kajian tentang perkembangan lingkungan strategis yang aktual menjadi sangat vital bagi TNI AD, terutama bagi Kostrad sebagai kekuatan pemukul strategis TNI AD dalam hampir semua operasi militer.

Salah satu kekuatan Kostrad dalam operasi militer adalah kemampuan pertahanan udaranya. Setiap Divisi Infanteri Kostrad diperkuat 1 batalyon Arhanud yang dipersenjatai Alutsista Arhanud terbaik yang dimiliki TNI AD. Operational requirement bagi Alutsista Arhanud di jajaran Kostrad diprioritaskan pada jenis rudal dan meriam dengan daya tembak dan daya hancur yang tinggi, serta memiliki mobilitas di segala medan, baik menggunakan platform kendaraan roda ban maupun roda rantai. Tentunya semua persyaratan tersebut dipenuhi dengan memperhatikan jenis ancaman udara yang dihadapi, taktik yang digunakan, serta kebutuhan serta kemampuan organisasi, baik dari segi personel, anggaran, maupun dukungan logistik dan pemeliharaan.

Saat ini satuan-satuan Arhanud Kostrad telah diperkuat Alutsista rudal Mistral buatan Perancis dan rudal Starstreak tipe terbaru buatan Inggris. Kedua jenis rudal tersebut termasuk dalam rudal Hanud jarak pendek terbaik di dunia dan telah combat proven di berbagai medan konflik. Starstreak menggunakan jenis rudal HVM (High velocity missile) berkecepatan 3,5 mach yang dipandu laser sehingga sulit dikecoh oleh sistem countermeasure dari pesawat tempur manapun. Rudal ini diklaim mampu menghancurkan sasaran hingga jarak 8 km pada ketinggian 3.000 m. Sementara itu, rudal Mistral merupakan jenis rudal berpenuntun inframerah dengan system kendali fire and

forget teknologi terbaru yang telah disempurnakan sehingga tingkat akurasinya sangat tinggi. Kedua jenis rudal ini didukung dengan radar penangkap sasaran udara dengan kemampuan deteksi 3D dan cakupan yang luas. MCP (Mistral Coordination Post) adalah kombinasi antara Radar 3D dan sistem kendali operasi bagi satuan-satuan tembak rudal Mistral yang ampuh mendeteksi 20 sasaran sekaligus mengendalikan hingga 12 Satbak rudal secara simultan. Sementara itu, Radar Shikra atau dikenal juga dengan nama Control Master 200 (CM200) yang dimiliki oleh setiap baterai Rudal Starstreak selain mampu menyuplai data sasaran udara bagi 20 Satuan rudal juga mampu difungsikan sebagai Air Space Control (Pengendali ruang udara) dengan kemampuannya mengawasi 200 penerbangan dalam radius hingga 250 km. Kedua jenis radar ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi yang tangguh yang diklaim tahan terhadap jamming berkekuatan sedang dan tinggi, setara dengan kemampuan radar-radar milik negara anggota NATO.

Meski di atas kertas Alutsista Arhanud Kostrad tersebut cukup memberi efek gentar yang besar, masih banyak 'PR' yang harus dibenahi guna mewujudkan kemampuan Hanud Kostrad yang benar-benar handal. Diantaranya adalah tentang modernisasi Alutsista satuan Arhanud Kostrad yang angkanya baru mencapai 60% dan rencana pembentukan satuan-satuan Arhanud baru yang sejalan dengan pengembangan kekuatan dan tuntutan tugas Kostrad yang semakin luas.

Guna menjawab tantangan tersebut TNI AD telah menyusun kebijakan pengembangan kekuatan Arhanud TNI AD yang mencakup pemenuhan Alutsista dan validasi serta pembentukan satuan-satuan Arhanud, baik di jajaran Kostrad maupun di Kodam-Kodam yang memiliki wilayah-wilayah strategis atau objek vital nasional. Bagi Kostrad, dalam 5 s.d. 10 tahun ke depan satuan-satuan Arhanudnya akan diperkuat rudal-rudal jarak sedang dan jarak jauh yang mampu menghadang berbagai jenis pesawat udara modern, rudal jelajah (cruise missile), dan rudal balistik jarak jauh (ballistic missile), bahkan UAV/drone. Tidak hanya itu, guna menjamin perlindungan udara

bagi unsur manuver di darat, Alutsista berkemampuan C-RAM (Counter Rocket, Artillery, and Mortar) juga dipastikan akan diprioritaskan untuk melengkapi satuan-satuan Arhanud Kostrad. Jenis Alutsista terakhir ini adalah hasil kajian tentang ancaman udara terkini yang sering dihadapi pasukan darat di berbagai medan konflik aktual di seluruh dunia. Dengan proyeksi pembangunan Alutsista tersebut diharapkan satuan-satuan Arhanud Kostrad nantinya akan mampu memberikan perlindungan udara bagi satuan-satuan manuver, seperti satuan artileri, kavaleri, pusat konsentrasi pasukan, jalur logistik utama, dan pos komando, serta objek-objek vital bernilai taktis dan strategis lainnya di medan operasi dari semua spektrum ancaman udara, mulai dari pesawat udara, UAV, rudal jelajah, rudal balistik, roket artileri, hingga tembakan mortir, artileri, atau bom yang dijatuhkan dari udara sekalipun.

Namun tidak hanya itu. 'Pekerjaan rumah' dalam membangun kekuatan Arhanud Kostrad tidak hanya soal senjata atau 'gun'. Yang sama pentingnya adalah *man behind the gun* atau siapa yang menggunakan senjata itu, dan lebih penting lagi yaitu *how we man the gun* atau bagaimana kita menggunakan/memperlakukan senjata itu sendiri. Di sini yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana menyusun doktrin taktik bertempur Arhanud yang efektif lalu bagaimana melatihkannya ke satuan-satuan, dan bagaimana menjamin jalur logistik serta pemeliharaan Alutsista tersebut agar selalu siap operasional.

Perkara pengembangan doktrin bukanlah urusan 'sekali jadi'. Bukan pula dengan hanya menyadur dari buku-buku referensi atau field manual yang diberikan oleh pabrikan atau operator Alutsista di negara pembuatnya. Doktrin harus selalu di-update sesuai perkembangan zaman dan melalui proses uji teori dan uji praktik, baik di forum akademis, di medan latihan maupun di medan operasi. Senjata boleh sejenis, kemampuan Alutsista boleh dibanding-bandingkan, namun dalam urusan taktik dan teknik bertempur satuan-satuan Kostrad memiliki kekhasan yang menjadikannya andalan di medan tugas. Hal

ini dikarenakan doktrin yang digunakan terus-menerus diperbarui guna meng-counter ancaman yang terus berkembang dan mewadahi tuntutan tugas yang berbeda-beda. Hal ini juga berlaku bagi satuan-satuan Arhanud Kostrad. Latihan-latihan yang mencakup pengerahan satuan Arhanud Kostrad menjadi ajang pengujian dan implementasi doktrin taktik dan teknik yang disusun oleh Pussenarhanud (Pusat Kesenjataan Arhanud) sebagai pembina teknis kecabangan. Latihan-latihan tempur juga terbuka bagi eksperimen taktik-taktik baru yang tengah digodok TNI AD. Evaluasi pelaksanaan latihan tersebut serta hasil kajian pertempuran yang aktual dijadikan sebagai bahan baku dalam merumuskan doktrin yang valid. Jadi, jangan heran bila dalam berbagai kesempatan latihan, Alutsista Arhanud Kostrad diuji hingga batas kemampuan optimalnya, dan digunakan dalam medan-medan serta skenario yang mungkin tidak terbayangkan oleh perancang Alutsista itu sendiri. Penerapan taktik shoot and scoot atau hit and run contohnya, yang lazim digunakan dalam patroli satuan infanteri atau gerilya sudah beberapa kali diterapkan dalam latihan satuan Arhanud Kostrad. Teknik menembak rudal secara cross fire atau menembak sasaran udara dari arah bersilangan juga ditemukan dalam latihan Arhanud Kostrad. Teknik ini terbukti sangat ampuh melumat habis pesawat musuh yang terbang rendah. Saat ini satuan-satuan Arhanud di luar Kostrad turut mengadopsi teknik menembak rudal yang mampu mendongkrak kemampuan teknis Alutsista ini sampai batas maksimal. Bila doktrin telah dirumuskan, maka organisasi satuan dan karakteristik Alutsista akan disesuaikan guna mewadahi taktik dan teknik bertempur yang telah dianggap valid tersebut. Selanjutnya, organisasi yang telah divalidasi dan kemampuan Alutsista akan kembali diuji dalam berbagai tugas dan latihan. Disinilah siklus pengembangan kekuatan Arhanud Kostrad akan berulang. Proses ini juga diterapkan dalam menyusun kebijakan strategis pengembangan kekuatan TNI AD pada umumnya.

Terakhir, yang juga menjadi bagian dari pengembangan kekuatan Arhanud Kostrad adalah kemitraan dengan industri pertahanan. Sejalan dengan itu, satuan-satuan Arhanud Kostrad kini menjadi partner penting mitra pabrikan Alutsista. Pabrikan asing melalui mitra dalam negeri, seperti PT Pindad dan PT LEN menjalin kerjasama pemeliharaan dan asistensi dalam penggunaan Alutsista di satuan-satuan Arhanud. Kegiatan pemeliharaan berkala juga diwadahi dalam program kerja dan anggaran di level Mabesad. Memang, disadari bahwa sistem pemeliharaan materiil Alutsista di lingkungan TNI AD masih jauh dari sempurna. Maka dari itu,



Uploaded by: detikcom, Nov 18, 2018

berbagai upaya terus dikerahkan, anggaran yang ada juga dioptimalkan. Salah satunya dengan penguatan fungsi pemeliharaan Alutsista Arhanud oleh Dohar (Depo Pemeliharaan) Sista Arhanud yang langsung dikoordinir oleh Pussenarhanud. Sedikit demi sedikit sistem pemeliharaan ini diperbaiki dan dijadikan role model pemeliharaan Alutsista bagi satuan-satuan pengguna Alutsista modern lainnya di TNI AD. Dengan sistem pemeliharaan dan suplai logistik materiil yang terpusat maka Alutsista yang ada di satuan-satuan Arhanud akan selalu mendapat servis terbaik dan selalu siap operasional.



Uploaded by: indomiliter.com

Penutup.

Mungkin inilah yang bisa dikatakan sebagai penjabaran dari adagium kuno "Si vis pacem para bellum" yang sudah dikenal dimana-mana itu. Kekuatan militer TNI AD dan TNI pada umumnya, dibangun dengan susah payah dan dengan biaya yang tidak murah bukan semata-mata untuk memantik konflik dengan siapapun. Tapi, inilah bentuk investasi negara demi melindungi kehormatan dan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini.

Salam hormat kami. CAKRA!!!



Uploaded by: Okezone Nasional

Mayor Arh Helmy Ariansyah S.E. adalah abituren École de Guerre (War College/Sesko Perancis) tahun 2018, dan pemegang gelar Master de Sciences Humaines et Sociales dari Universitas Sorbonne Paris. Saat ini menjabat sebagai Danyonarhanud 1 Divif 1/Kostrad



GEMPA BUMI	2
ERUPSI GUNUNG API	0
KARHUTLA	0
KEKERINGAN	0
BANJIR	95
TANAH LONGSOR	25
PUTING BELIUNG	12



PANDEMI COVID-19 DAN BENCANA ALAM SERTA MITIGASINYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

EPIDEMI COVID-19 1

DAMPAK BENCANA NON ALAM EPIDEMI COVID-19

DAMPAK

KAN BENCANA ALAM TAHUN 2021

100

JENBATAN RUSAK

JENBATAN RUSAK

Pendahuluan.

Indonesia terkenal sebagai salah satu negara "Supermarket Disaster" dengan reputasi potensi bencana yang sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya bencana yang melanda berbagai wilayah di tanah air secara terus-menerus, baik yang disebabkan oleh faktor alam (gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, angin ribut, dll.) maupun oleh faktor nonalam seperti berbagai akibat kegagalan teknologi dan ulah manusia. Maraknya bencana tidak hanya menimbulkan kerugian, baik berupa korban jiwa dan kerugian harta benda, maupun yang menimbulkan penderitaan cukup berat bagi masyarakat yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

UNISDR (*United Nation Secretary for International Strategy for Disaster Reduction*) yaitu badan dunia yang mengurusi pengurangan dampak bencana pernah merilis secara resmi yang dipublikasikan oleh situs resmi BNPB bahwa di antara 265 negara yang disurvei tentang potensi bahaya tsunami, Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia. Tak kalah mengerikannya BNPB juga merilis data ditemukannya 214 cesar baru yang mengandung potensi megathrust. Belum lagi keberagaman demografi Indonesia yang sangat tinggi, di dalamnya juga mengandung potensi man-made disaster baik langsung maupun tak langsung. Dengan kata lain bencana adalah

bagian penting kehidupan atau core of bussines segenap komponen anak bangsa Indonesia.

Tingginya potensi bencana di Indonesia pada dasarnya tidak lebih dari sekadar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas di tanah air kita. Indonesia merupakan negara kepulauan tempat dimana tiga lempeng besar dunia bertemu, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas gunung api dan gempa bumi yang cukup tinggi. Lebih dari itu proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga membentuk relief permukaan bumi yang khas dan sangat bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, penurunan tanah, dan tsunaminya.

Berlokasi di Cincin Api Pasifik (wilayah dengan banyak aktivitas tektonik), Indonesia harus terus menghadapi resiko letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tsunami. Pada beberapa peristiwa selama 20 tahun terakhir, Indonesia menjadi headline di media dunia karena bencana-bencana alam yang mengerikan dan menyebabkan kematian ratusan ribu manusia dan hewan, serta menghancurkan wilayah daratannya (termasuk

banyak infrastruktur sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi). Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai force majeure, yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan atau kontrol manusia dan tidak dapat dihindarkan, termasuk covid-19 di dalamnya.

Pandemi Covid-19 yang menyebar secara cepat ke seluruh belahan dunia, tak terkecuali di negeri kita Indonesia, sudah dapat dikategorikan sebagai bencana global. Para ahli sepakat bahwa bencana tidak hanya persoalan seperti banjir, gempa, Karhutla, tanah longsor atau tsunami, tetapi wabah penyakit pun masuk kategori bencana. Karenanya bencana pandemi covid-19 memerlukan mitigasi atau penanganan matang terkait langkah dan upaya pencegahannya.

Pembahasan.

Mitigasi Bencana di Indonesia. Secara bahasa, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Penyelenggaraan mitigasi bencana dapat dilakukan dengan beberapa langkah teknis yang perlu disampaikan ke masyarakat agar fenomena ini teratasi secara tepat dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam dan atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi. Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dimensi baru dari rangkaian peraturan tersebut adalah :

(1) penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan pro-aktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi; (2) penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi; (3) penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana.

Berdasarkan **data dan fakta** bahwa pada hampir dua dasawarsa terakhir (1997-2017) telah tercatat lebih dari 6.632 peristiwa bencana alam baik besar maupun kecil. Kejadian ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan (Subduction) antar lempeng yang mengakibatkan gempa "tektonik dan vulkanik, tsunami, gunung meletus yang sering terjadi dan hal-hal lain seperti tingginya curah hujan yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan, Angin puting beliung dan lain sebagainya. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) yang disusun BNBP; 322 kabupaten/kota ($\pm 65\%$) dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki indeks multi resiko bencana tinggi dan tidak terdapat kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki kelas multi-resiko rendah terhadap ancaman bencana alam geologi maupun hidrometeorologi. Beberapa peristiwa bencana seperti bencana letusan gunung berapi yang berdampak berat dalam sejarah Indonesia disebutkan pada tabel di bawah. Daftar ini hanya mencakup letusan yang berskala besar dan menewaskan paling sedikit 20 orang.

Tabel 1.1. Daftar Letusan Gunung dan Korban Jiwa

Gunung Api	Lokasi	Tanggal Letusan	Korban Jiwa
Merapi	Jawa Tengah	03 November 2010	138
Kelut	Jawa Timur	10 Februari 1990	35
Galunggung	Jawa Barat	05 April 1982	68
Merapi	Jawa Tengah	06 Oktober 1972	29
Kelut	Jawa Timur	26 April 1966	212
Agung	Bali	17 Maret 1963	1,148
Merapi	Jawa Tengah	25 November 1930	1,369
Kelut	Jawa Timur	19 Mei 1919	5,110
Awu	Sulawesi Utara	07 Juni 1892	1,532
Krakatau	Selat Sunda	26 Agustus 1883	36,600
Galunggung	Jawa Barat	08 Oktober 1822	4,011
Tambora	Sumbawa	10 April 1815	71,000+

Bencana gempa bumi dapat memakan korban besar, karena terjadi tiba-tiba dan bisa menyerang wilayah padat penduduk, seperti kota-kota besar. Gempa bumi dengan kekuatan sekitar 5 atau 6 skala Richter terjadi hampir setiap hari di Indonesia namun biasanya tidak menyebabkan atau hanya sedikit menyebabkan kerugian. Kalau kekuatan gempa melewati 7 skala Richter, sebuah gempa bisa menyebabkan banyak kerusakan. Rata-rata, setiap tahunnya terjadi satu gempa bumi dengan 7 skala Richter (atau lebih) di Indonesia dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur maupun lingkungan hidup. Di bawah ini terdapat daftar gempa bumi-gempa bumi yang terjadi dalam sejarah baru-baru ini dan menyebabkan kerusakan parah beserta korban jiwa paling tidak 20 orang:

Tabel 1.2. Daftar Gempa Bumi dan Korban Jiwa

Pulau	Tanggal	Kekuatan	Korban Jiwa
Sumatra	07 Desember 2016	6.5	104
Sumatra	02 Juli 2013	6.1	42
Sumatra	25 Oktober 2010	7.7	435
Sumatra	30 September 2009	7.6	1,117
Jawa	02 September 2009	7.0	81
Sumatra	12 September 2007	8.5	23
Sumatra	06 Maret 2007	6.4	68
Jawa	17 Juli 2006	7.7	668
Jawa	26 Mei 2006	6.4	5,780
Sumatra	28 Maret 2005	8.6	1,346
Sumatra	26 Desember 2004	9.2	283,106

Sementara itu korban yang ditimbulkan oleh akibat bencana Pandemi Covid -19 juga tidak bisa dikatakan sedikit, bahkan dari hari ke hari semakin meningkat. Berikut tabel/grafik korban Pandemi Covid-19:



Banyaknya korban yang terjadi akibat bencana, juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan dan masih kurangnya sosialisasi tentang mitigasi bencana. Pemerintah sudah

menaruh perhatian yang lebih serius pada urusan edukasi ini, beragam perbaikan telah dilakukan, tetapi penurunan risiko tetap tidak berubah signifikan. Untuk itulah diperlukan pendekatan lain dalam bencana di luar apa yang sudah dilakukan sekarang ini dalam rangka mengedukasi masyarakat agar sadar bencana, seperti halnya memandang dari perspektif Islam dengan memadukan kampanye sadar bencana dalam syiar maupun ceramah agama oleh para ulama yang lazim dan rutin dilaksanakan di lingkungan masyarakat luas.

Sebenarnya jauh sebelum manusia era modern mengkaji tentang bencana di dunia, istilah mitigasi dan bencana itu sudah diperingatkan oleh Allah dalam Alquran. Istilah mitigasi yang kita kenal sekarang ini jauh sudah diperkenalkan oleh Al-Quran ribuan tahun lalu. Terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan mengenai sejarah bencana yang pernah terjadi di dunia ini, mulai dari bencana yang pernah terjadi pada masa Nabi Nuh AS, Ibrahim AS, Luth AS, Syu'aib AS, Shalih AS dan Musa AS. Semua itu dapat kita pahami, betapa kita harus mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut sebagai upaya mitigasi (pencegahan), agar bencana tidak serta-merta menyinggahi kita.

Mitigasi Bencana dalam Perspektif Islam.

Memang jauh dari memadai jika persoalan kemanusiaan ditimpakan hanya kepada pemerintah saja, atau hanya pada pihak-pihak non-pemerintah. Semestinya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun LSM-LSM yang beroperasi baik di pusat maupun di daerah, bergerak dalam satu visi kemanusiaan demi kesejahteraan dan kecintaan. Dalam hal itu, sudah saatnya Indonesia sebagai negara-bangsa memiliki sistem yang mapan dalam soal relawan, sebagaimana di negara-negara seperti Thailand, India, Pakistan, Australia, Jepang, Amerika, dan di negara-negara Eropa.

Dunia relawan merupakan perimbangan atas terjadinya bencana dan disparitas sosial di dalam masyarakat kurang beruntung dan daerah-daerah terpencil. Bagaimanapun dunia kita masih memiliki hampir semua problematik kemanusiaan, tak hanya bencana alam, maupun wabah penyakit seperti

Corona, tetapi juga masih rentan konflik, problem sosial dari mulai anak-anak dan keluarga terlantar, sampai mewabahnya penyakit menular HIV/AIDS. Semua itu menuntut upaya perbaikan lewat sebuah sistem yang terlembagakan dan diartikulasi oleh relawan-relawan kemanusiaan secara profesional, baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

Dengan jaringan relawan ketika kita melihat tragedi kemanusiaan, kita tidak lagi berpikir mengapa dan apa yang harus diperbuat, dengan sebuah tanda tanya yang membingungkan. Melainkan kita sudah selalu siap atas kemungkinan-kemungkinan terburuk akan semua fenomena baik yang sudah, sedang, dan belum terjadi.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam. Dari penglihatan terhadap ayat-ayat al-Qur'an, tampak bahwa bencana itu menjadi ujian bagi manusia untuk mengetahui apakah kualitas manusia yang mengalami bencana itu menjadi lebih baik atau sebaliknya. Bencana itu bisa juga menjadi peringatan bagi manusia agar meningkatkan kualitas hidup dan sikapnya untuk menghindari keadaan yang lebih buruk dan segera kembali ke jalan kebajikan. Dalam Al-Qur'an bencana atau musibah disebutkan beberapa kali. Kata musibah sendiri memiliki makna segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh manusia dan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, bencana juga bisa menjadi hukuman (adzab) bagi orang-orang yang telah melakukan penyimpangan atau kerusakan (fasad) di muka bumi. Kisah-kisah tentang kehancuran Kaum 'Ad dan Tsamud menggambarkan bencana yang mereka alami sebagai siksaan Allah di dunia. Di atas itu semua, Al-Qur'an mendorong agar manusia yang mengalami maupun yang menyaksikan bencana itu untuk mengambil hikmah bagi perbaikan kehidupan individual maupun kolektif umat manusia selanjutnya. Menilai apakah sebuah bencana merupakan ujian, peringatan atau 'adzab adalah hak Allah, dan kewajiban manusia adalah mengambil hikmah dibaliknya.

Dalam menghadapi bencana covid-19, meskipun ilmu kedokteran sudah maju dan

modern, masih banyak diantara kita masih menggunakan metode lama yang masih digunakan sampai sekarang. Ada banyak kepercayaan medis masa lalu yang tetap eksis di zaman modern ini. Seolah tak tergantikan, metode itu bahkan lebih populer dari praktik kedokteran yang lebih canggih. Ditambah lagi dengan berbagai macam pengobatan herbal yang dipercaya dapat mencegah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti madu, minyak kayu putih, ramuan Pancasila (yang sering digunakan oleh TNI AL sejak dahulu) dan berbagai macam tumbuhan herbal lainnya yang tumbuh berkembang di tanah bumi pertiwi ini. Namun pada kenyataannya sebagian besar dari kita lebih bangga mengonsumsi dan menggunakan suplemen dan obat-obatan dari negara lain, kecuali masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, mereka masih percaya dan yakin dengan cara pengobatan dari peninggalan leluhurnya. Tentu setiap orang memiliki tingkat pengetahuan dan sugestifitas yang berbeda-beda baik terhadap metode pengobatan maupun pencegahannya.

Sebagai upaya mitigasi terbaik bencana tersebut, Allah mengharuskan manusia untuk menjaga kesehatan diri dan menjaga kelestarian alam. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan dan melarang manusia untuk merusak alam atau lingkungan serta menegaskan bahwa bencana bisa terjadi karena akibat ulah manusia itu sendiri. Dalam rangka membangun sikap positif terhadap alam, Allah secara jelas melarang manusia berperilaku rakus atau thama', berfoya-foya atau berlebih-lebihan dalam mengeksplorasi alam. Allah juga melarang manusia untuk bersikap boros, egoistik dan hanya berfikir untuk kepentingan jangka pendek serta melupakan nasib manusia yang akan datang. Ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa menebang pohon Bidara, pohon yang besar dan rindang, maka Allah siram kepalanya dengan air panas (*man qoto'a sidrotun showabullaha ro'sahu finnar*). Maka perilaku negatif itu semua akan membawa malapetaka atau bencana.

Di samping prinsip-prinsip untuk mitigasi itu, Allah mengajarkan prinsip-prinsip yang mendorong manusia untuk merespons bencana dengan baik. Dalam area itu, Islam mengharuskan manusia untuk menjaga keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain (*ifsy'a al-salam*). Lebih dari itu, menyelamatkan diri sendiri dari bahaya adalah sebuah kewajiban (*wa la tulqu bi aydikum ila al-tahlukah*); dan demikian juga menyelamatkan jiwa orang lain. Jika tidak melakukan itu, maka seseorang yang sesungguhnya mampu melakukannya berati termasuk orang yang melakukan pembunuhan secara tidak langsung.

Menyelamatkan diri atau orang lain dari bahaya termasuk dalam kategori *ikhtiyar* (usaha) yang wajib dilakukan. Umar bin Khathab dikisahkan menghindari suatu daerah yang sedang dilanda wabah penyakit. Ketika ditanya apakah perbuatan seperti itu tidak berarti menghindar dari takdir karena terkena penyakit adalah sebuah takdir yang jika Allah telah menetapkannya, maka manusia tidak akan bisa menghindar. Maka 'Umar menjawab bahwa ia menghindari suatu takdir untuk menuju takdir yang lain. Kisah ini menggambarkan bahwa fatalisme (*pasrah*) dalam situasi bencana adalah sikap yang tidak dibenarkan oleh Islam. Allah milarang orang-orang yang beriman untuk putus asa ketika ditimpa bencana dan mengharuskan bersikap positif terhadap pertolongan Allah. Dalam semangat yang sama walaupun dalam konteks yang berbeda, Nabi Muhammad SAW mengharuskan umatnya untuk memenuhi hak-hak keselamatan diri, misalnya larangannya terhadap puasa wisal (bersambung, tanpa buka) dan menyatakan bahwa badan dan mata manusia punya hak istirahat agar tetap dalam keadaan sehat. Dalam makna yang lebih luas, ini berarti kewajiban untuk menyelamatkan nyawa manusia.

Adapun contoh respon terbaik dalam menghadapi musibah bencana adalah bersabar. Inilah yang dianjurkan dalam Q.S. al-Baqarah: Apabila para korban bersikap sabar, maka Allah SWT akan memberi tiga anugerah. Pertama, rahmat yang agung (*shalawat*).

Dalam konteks ini, menguatnya rasa kemanusiaan berupa solidaritas sosial. Kedua, kasih sayang (rahmat), menjalin kembali persatuan dan kesatuan, sekalipun berbeda pilihan politis; serta bergotong-royong membantu para korban bencana sesuai dengan kemampuan. Ketiga, solusi (*hidayah*). Apabila para korban bencana alam tidak bersabar, maka dapat menimbulkan perasaan putus asa, depresi, dan gangguan mental lainnya. Bahkan bisa jadi berujung pada aksi bunuh diri. Sedangkan para korban bencana alam yang bersabar, maka dapat menimbulkan perasaan percaya diri untuk berbenah dan mencari solusi. Pada tataran ini, kita sebagai bangsa Indonesia yang tidak terkena bencana alam, wajib bersyukur dengan cara membantu para korban bencana, sebagai alternatif solusi, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing.

Manusia dengan sifat alaminya yang menginginkan kenyamanan, dan lebih mengejar hawa nafsu sehingga sering tidak mengedepankan logika berpikirnya, perlu diberikan kesadaran yang kuat dan melekat dalam diri dan kehidupannya. Bila kesadaran ini sudah melekat dalam kehidupannya maka akan menjadi kebiasaan dan untuk menumbuhkan kesadaran harus didengungkan terus-menerus dalam kehidupan kesehariannya. Demikian juga halnya dengan menumbuhkan sadar bencana dapat dilakukan dengan menggandeng para ulama yang dalam rutinitas kegiatan syiar dan ceramahnya menyelipkan tentang kesadaran akan bencana. Metode ini akan sangat efektif dan dapat dilaksanakan secara masif meliputi seluruh wilayah serta lapisan masyarakat.



Uploaded by: TNI Angkatan Darat

Penutup.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sebenarnya Islam telah mengajarkan tentang bagaimana cara umatnya memandang suatu bencana dan bagaimana mitigasi harus dilakukan. Secara garis besar Islam menilai apakah sebuah bencana merupakan ujian, peringatan atau 'adzab adalah hak Allah, dan kewajiban manusia adalah mengambil hikmah di baliknya. Seperti QS. An naml. (watarol jibala tafsabuha jaa midatan wahiya tamuru marros sahaab) yang artinya dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka tidak bergerak dari tempatnya padahal gunung-gunung bergerak sebagaimana awan bergerak. Sehingga kita harus selalu siap untuk menghadapi bencana apa pun, kapanpun dan dimanapun kita berada.



Uploaded by: Good News Indonesia

- b. Jika kita terkena bencana maka menurut Islam, kita wajib bersabar supaya dapat menimbulkan perasaan percaya diri untuk berbenah dan mencari solusi. Sedangkan jika kita tidak terkena bencana, maka wajib bersyukur dengan cara membantu para korban bencana sesuai dengan kapasitas kita masing-masing.



Uploaded by: BPSPD M Kementerian Pu

- c. Pemerintah termasuk TNI AD di dalamnya tidak dapat berdiri sendiri dalam mengkampanyekan mitigasi bencana ini, dengan potensi demografi Indonesia yang sangat mendukung maka lebih efektif jika menggandeng para ulama yang memang juga sesuai dengan Tupoksinya.



Uploaded by: Google.com

Kolonel Inf Kosasih , S.E., merupakan Abituren Akmil 1993 dan lulusan Seskoad tahun 2007, Sesko TNI tahun 2018. Saat ini sedang melaksanakan Dik PPRA LXII Lemhannas RI.



Kolonel Inf Yamin

PERAN TNI AD DALAM MEMPERKUAT STRATEGI PEMERINTAH MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Pendahuluan.

Pandemi Virus coronavirus Disease (Covid-19) yang muncul pada awal tahun 2020 menjadi masalah kesehatan global yang mengancam seluruh negara di dunia. Menyikapi tren perkembangan tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global (*global pandemic*). Pandemi Covid-19 menunjukkan perkembangan atau penularan yang sangat cepat dari waktu ke waktu.

Dalam tempo kurang lebih empat bulan setelah ditetapkan sebagai pandemi global, penyebaran Covid-19 sudah menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus positif dan jumlah kematian yang semakin meningkat. Tidak bisa dipungkiri bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia telah berdampak signifikan pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta ke-sejahteraan masyarakat. Menanggapi perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) Covid-19. Keppres tersebut menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan

KKM dan menetapkan KKM Covid-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pertimbangan penyebaran Covid-19 yang berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada berbagai aspek kehidupan yang luas, Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama tujuh bulan dan masih menunjukkan tren perkembangan kasus positif yang belum bisa dikendalikan secara total, meskipun di beberapa daerah di Indonesia perkembangan Covid-19 sudah melandai. Bukan hanya Indonesia yang mengalami situasi itu, namun ratusan negara di dunia juga masih berjuang dengan segala daya untuk menghentikan laju perkembangan virus yang mematikan itu. Sampai dengan tanggal 28 September 2020, jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia secara kumulatif berjumlah 281.724 kasus; sembuh 206.870 orang; meninggal 10.473 orang.

Penanggulangan bencana nasional nonalam Covid-19 tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh instansi negeri maupun swasta, termasuk dunia usaha, organisasi sosial keagamaan, partai politik, LSM, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Sebagai instrumen pencegahan penyebaran Covid-19, sejak bulan Maret 2020 telah mengeluarkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh WHO. Penerapan protokol kesehatan merupakan cara yang paling tepat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di berbagai area publik. Penerapan protokol kesehatan harus dilakukan secara masif sehingga hasilnya dapat maksimal. Namun, penerapan protokol kesehatan itu mendapat tantangan di tengah masyarakat akibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakannya, baik karena faktor budaya maupun karena faktor sosial. Untuk mendisiplinkan warga dalam menerapkan protokol kesehatan pemerintah melibatkan TNI dan Polri melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Inpres tersebut memerintahkan kepada Panglima TNI untuk memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dan melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Penerapan protokol kesehatan dalam bentuk menjaga jarak sosial (social distancing) maupun menjaga jarak fisik (physical distancing) yang dibarengi dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di beberapa provinsi dan

Dampak dari Covid-19 berpengaruh pada aspek bidang politik, salah satunya adalah tertundanya pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang sedianya dilaksanakan pada 9 September 2020 namun dijadwal ulang menjadi 9 Desember 2020. Bukan hanya itu, mekanisme pemungutan suara dalam Pilkada serentak 2020 juga masih dalam proses pembahasan di internal KPU.

Pembahasan.

Sebagai dampak dari pandemi Covid-19 sangat berpengaruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada sektor ekonomi yang terkait dengan pengelolaan APBN. Sejak WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, pemerintah Indonesia mengalami situasi pemerintahan yang memerlukan kebijakan khusus, terutama terkait dengan anggaran negara di mana anggaran yang telah diputuskan dalam APBN 2020 dinilai tidak mencukupi dalam rangka melakukan penanganan Covid-19 di tanah air. Presiden RI menyebut kondisi ini sebagai keadaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga Presiden sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Perppu tersebut telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang pada akhirnya Perppu tersebut disetujui menjadi Undang-Undang.

Undang-undang tersebut menjadi fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Ada beberapa kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

baru tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Tambahan Belanja APBN 2020 Sejumlah Rp 405,1 Triliun. Pemerintah memutuskan untuk menambah APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 Triliun. Anggaran ini sebelumnya tidak ada dalam APBN 2020, namun pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk menyediakannya dengan cepat. Oleh karena itu, Undang-Undang ini merupakan payung hukum bagi penyediaan anggaran tersebut. Penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah sektor, yakni: (1) untuk belanja bidang kesehatan dialokasikan Rp 75 triliun; (2) untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp 110 triliun; (3) untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) dialokasikan Rp 70,1 triliun; dan (4) untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM, dialokasikan Rp 150 triliun.
- b. Prioritas Anggaran di Bidang Kesehatan. Pembelanjaan anggaran Rp 75 triliun di bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk pemenuhan sejumlah keperluan, yang terdiri dari : (1) perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian Alat Pelindung Diri (APD); (2) pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan sebagainya; (3) pemutakhiran fungsi pelayanan terhadap 132 rumah sakit rujukan Covid-19 di seluruh Indonesia, termasuk Wisma Atlet yang dijadikan sebagai rumah sakit penyangga untuk menangani pasien Covid-19; (4) insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit, dengan rincian: insentif dokter spesialis Rp 15 juta/bulan, dokter umum Rp 10 juta/bulan, perawat Rp 7,5 juta/bulan, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta/bulan; (5) santunan kematian tenaga medis yang menangani kasus Covid-19 dengan jumlah Rp 300 juta per orang; dan (6) penanganan permasalahan kesehatan lainnya.
- c. Prioritas Anggaran untuk Perlindungan Sosial. Pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial saat pandemi Covid-19 ke sejumlah program, yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, hingga keringanan tarif listrik. Rinciannya adalah sebagai berikut : (1) jumlah penerima manfaat PKH ditambah dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga; (2) jumlah penerima manfaat Kartu Sembako juga ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta orang; (3) pembebasan biaya listrik selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik rumah tangga yang memiliki daya listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA; (4) anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat program ini akan menerima insentif pascapelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan 1 juta; dan (5) dukungan logistik Sembako dan kebutuhan pokok untuk masyarakat terdampak Covid-19 sejumlah Rp 25 triliun.
- d. Prioritas Anggaran untuk Insentif Dunia Usaha. Pemerintah memberikan sejumlah insentif sebagai stimulus ekonomi untuk para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan dunia usaha demi kelangsungan usaha mereka, berupa: (1) penggratisan PPh 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta (selama setahun); (2) pembebasan PPN impor bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama KITE dari kalangan industri kecil dan menengah, pada 19 sektor tertentu; (2) pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama industri kecil menengah, pada sektor tertentu; (3) percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha;

(4) penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen; dan (4) penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan.

Prajurit TNI dan Covid-19.

Prajurit TNI yang terdiri dari tiga matra dan bertugas di seluruh provinsi dan kabupaten/kota hingga desa terpencil di seluruh Indonesia, juga rentan terinfeksi Covid-19 karena interaksinya dengan masyarakat yang ada di sekitar. Dengan kata lain, prajurit TNI tidaklah kebal terhadap infeksi Covid-19. Laporan pimpinan TNI kepada Komisi I DPR pada tanggal 15 April 2020 tentang personel TNI dari tiga angkatan yang terinfeksi Covid-19, patut mendapat perhatian serius.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, terdapat 1.187 kasus Covid-19 yang terkait dengan personel TNI di Markas Besar TNI. Sebanyak 55 orang terdeteksi positif, sebanyak 190 pasien dalam pengawasan (PDP), 873 orang dalam pemantauan (ODP), dan sebanyak 15 orang meninggal dunia.

Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa juga melaporkan bahwa sebanyak 285 personel militer aktif dan 178 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan TNI AD sedang mendapatkan perawatan akibat terinfeksi Covid-19. Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji juga mengungkapkan bahwa ada 20 orang prajurit dari TNI AL telah dinyatakan positif Covid-19, sebanyak 32 orang PDP, dan 97 ODP. Penyebaran Covid-19 juga terjadi di kalangan TNI Angkatan Udara. Penjelasan dari Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna menyebutkan, sebanyak 346 orang yang terdiri atas anggota TNI AU dan keluarganya, serta PNS di wilayah kerja TNI AU berada dalam status ODP. Sebanyak 23 orang lainnya berstatus PDP, dan 34 orang lainnya dinyatakan positif Covid-19.

Fakta ini menunjukkan bahwa Covid-19 dapat menginfeksi siapa saja tanpa memandang bulu, baik itu aparat keamanan, pegawai eksekutif, politisi, hingga rakyat biasa.

Di sinilah pentingnya seluruh rakyat Indonesia dari segala kalangan dan elemen bangsa untuk patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya. Sampai saat ini penerapan protokol kesehatan merupakan langkah paling tepat dan efektif dalam mencegah penularan Covid-19 karena belum ada vaksin paten yang direkomendasikan oleh WHO maupun obat khusus untuk Covid-19. Puluhan negara di dunia, termasuk Indonesia, saat ini sedang mengembangkan vaksin untuk melawan pandemi Covid-19 yang telah mewabah ke seluruh dunia selama tujuh bulan terakhir.

Peran TNI AD dalam Memperkuat Pemerintah Menghadapi Pandemi Covid-19.

Keterlibatan TNI dalam membantu pemerintah daerah dalam pembangunan maupun kepentingan sosial dan kemanusiaan (civic mission), telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf b tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang terdiri dari 14 poin, antara lain : (1) membantu tugas pemerintahan di daerah; (2) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; dan (3) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue). Terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah, TNI AD di seluruh Indonesia telah banyak terlibat aktif secara institusi dalam beberapa bidang. Keterlibatan tersebut, baik mengacu pada konsep OMSP yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI maupun menurut peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19.

a. Bantuan di Bidang Medis.

Sejak bulan Maret yang lalu TNI AD telah terlibat aktif membantu pemerintah mempercepat penanganan dan penanggulangan Covid-19 dengan menyiapkan rumah sakit yang dimiliki TNI AD dari pusat sampai di daerah sebagai rumah sakit rujukan pasien Covid-19 atau sebagai rumah sakit penyangga. Rumah-rumah sakit milik Kodam maupun Korem di seluruh Indonesia telah

ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan ataupun rumah sakit penyangga penanganan Covid-19 di setiap daerah. Hal ini karena rumah sakit milik pemerintah kekurangan ruangan perawatan, sehingga rumah sakit milik TNI AD juga digunakan untuk mempercepat penanganan pasien Covid-19.

Personel TNI berada di hampir segala lini misi penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia. Sampai saat ini, ratusan personel telah dikerahkan baik untuk menangani pasien Covid-19 secara langsung maupun sebagai tenaga pendukung dalam bidang transportasi dan logistik untuk mengangkut serta mendistribusikan alat-alat kesehatan dari dalam serta luar negeri ke berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia. Berdasarkan data pada akhir Maret lalu, sebanyak 18 dokter militer dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto telah dikerahkan untuk membantu dokter dan tenaga medis lainnya di rumah sakit darurat Wisma Atlet, Jakarta.

Di tingkat pusat, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan I) yang meliputi wilayah pertahanan Pulau Sumatera, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, telah membentuk Komandan Gabungan Tugas Terpadu (Kogasgabpad) di empat lokasi. Kogasgabpad I dipimpin oleh Pangdam Jaya bertugas mendukung perawatan pasien terinfeksi Covid-19 dan menjalankan fasilitas isolasi dan karantina di rumah sakit darurat Wisma Atlet, Jakarta.

Kogasgabpad II berada di bawah pengawasan Pangkoopsau I bertempat di Natuna (Kepulauan Riau). Warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Kota Wuhan pada Februari 2020 lalu menjalani proses isolasi dan perawatan dari para personel TNI di pangkalan militer ini. Kogasgabpad III berlokasi di Pulau Sebaru (Kepulauan Seribu, Jakarta) berada di bawah kendali Pangkoarmada I.

Dengan beban tugas yang sedemikian banyak dan berat, risiko penularan Covid-19 di antara personel TNI AD dan keluarganya tentu saja tidak dapat dianggap sepele.

Oleh karena itu, penanganan Covid-19 yang dijalankan oleh TNI AD bersifat dua arah, yaitu untuk internal institusi TNI AD sendiri dan untuk masyarakat di luar TNI AD. Setidaknya telah ada dua orang tenaga medis TNI AD yang telah meninggal akibat Covid-19.

Melihat peran vital TNI AD dalam upaya mitigasi Covid-19 dan menyetop penyebaran virus tersebut, pemerintah pusat dan daerah sudah seharusnya memberikan perhatian yang lebih bagi keamanan dan kesehatan para personel militer yang bertugas sebagai tenaga medis maupun non-medis. Peningkatan korban meninggal dunia, pasien positif Covid-19, PDP, dan ODP dari kalangan TNI AD serta keluarganya memiliki kemungkinan berdampak luas.

Selanjutnya, ketersediaan dan kesiapan alat kesehatan, seperti APD dan masker bagi dokter serta tenaga medis militer lainnya pun mesti dijamin dengan baik. Dengan demikian, upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh TNI AD akan lebih bersifat dua arah dan berjalan secara simultan, yaitu penanganan eksternal yang ditujukan kepada institusi sipil atau infrastruktur kesehatan serta masyarakat umum, dan penanganan internal yang bertujuan memastikan keamanan serta kesehatan personel TNI itu sendiri.

Muhamad Haripin dari Pusat Penelitian Politik LIPI Jakarta mengingatkan bahwa para pimpinan kesatuan TNI AD di daerah pun perlu memastikan para personel yang bertugas di lapangan berada dalam kondisi yang sehat dan tidak terinfeksi Covid-19 guna mencegah potensi menjadi penyebar (spreader). Dalam laporan-laporan dari internal TNI disebutkan banyak kesatuan militer di daerah yang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan Covid-19 maupun pembagian bahan makanan atau Sembako secara gratis, terlibat dalam kegiatan penyemprotan disinfektan di ruang publik yang dilakukan pemerintah daerah setempat, dan pembentukan dapur umum di wilayah-wilayah tertentu. Jangan sampai kegiatan yang bertujuan mulia tersebut justru menambah peta persebaran Covid-19.

Perkembangan terbaru peran TNI AD dalam membantu pemerintah dalam

menangani pandemi Covid-19 adalah kolaborasi antara Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI AD dalam menemukan kombinasi obat untuk menyembuhkan pasien Covid-19. Meskipun penemuan obat Covid-19 ini sempat memancing polemik di tengah masyarakat, namun ketiga institusi itu tetap bertekad untuk memberi sumbangsih positif dalam upaya melawan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta Unair untuk menyempurnakan uji klinis obat yang ditemukan tersebut. Kepala BPOM Penny Lukito mengaku telah menerima hasil revisi terkait uji klinis obat kombinasi Covid-19 dari Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakil Kapolri Komjen Pol Eddy Gatot Pramono pada tanggal 18 Agustus 2020 yang lalu. Hasil revisi tersebut merupakan respons terhadap inspeksi yang dilakukan oleh BPOM pada tanggal 28 Juli yang lalu.

b. Bantuan di Bantuan Sosial dan Logistik.

Personel TNI AD kembali terlibat secara aktif membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi Covid-19 pada saat beberapa daerah provinsi atau kabupaten/kota menerapkan di Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berbarengan dengan penerapan PSBB tersebut instansi pemerintah juga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*) bagi pegawai atau karyawannya. Sejumlah perusahaan juga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah dan bahkan sebagian perusahaan merumahkan sebagian karyawannya. Akibatnya, banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 yang harus mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin Makassar, misalnya, pada saat pemerintah Kota Makassar memberlakukan PSBB pada bulan April 2020, ratusan prajurit TNI AD Kodam XIV/Hasanuddin dikerahkan untuk mengantarkan paket Sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kota Makassar.

Penerapan PSBB di Kota Makassar pada bulan April yang lalu bertepatan dengan bulan Ramadan. Pada saat itu Kodam XIV/Hasanuddin membuka dua dapur umum untuk menyediakan menu makan sahur dan buka puasa untuk 6.000 orang yang terdampak Covid-19 di kota Makassar. Perjuangan para prajurit TNI AD tersebut tidak mengenal waktu sebagai bukti empati dan rasa kemanusiaan prajurit TNI AD, sekaligus sebagai bukti keseriusan dalam membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Perjuangan ratusan prajurit TNI AD Kodam XIV/Hasanuddin dalam mengantar paket logistik atau sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 tidak seluruhnya menempuh medan yang mulus. Pada saat mengantarkan paket makan sahur dan buka puasa kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Tallo di Kelurahan Lakkang, para prajurit TNI AD harus menggunakan perahu kecil menyusuri sungai sejauh enam kilometer dari jalan poros di sekitar Makodam XIV/Hasanuddin. Menangani masalah penyebaran Covid-19 serta masalah kemanusiaan yang muncul sebagai dampak sosialnya, memang tidak akan efektif jika hanya ditangani oleh pemerintah daerah karena keterbatasan personel maupun infrastruktur. Masalah Covid-19 adalah masalah kita bersama sehingga membutuhkan keserempakan gerak oleh berbagai pihak dalam membangun sinergi yang kuat dalam upaya menanggulangi penyebaran Covid-19 sekaligus mengatasi berbagai dampak sosial ikutannya.

Baru-baru ini pemerintah meluncurkan paket bantuan modal usaha bagi UMKM super mikro yang omzetnya kurang dari 50 juta per tahun melalui kredit lunak. Pihak Dewan Koperasi dan perbankan kembali mengandeng TNI AD dalam penyaluran kredit usaha tersebut dengan melibatkan TNI dalam pendataan masyarakat yang memiliki usaha yang layak mendapat bantuan. Hal ini juga menunjukkan bahwa instansi pemerintah sangat percaya kinerja TNI dalam kaitannya dengan penanggulangan dampak sosial dan dalam urusan kemanusiaan, sehingga hasil

kerja TNI tidak diragukan lagi. Kodam XIV/Hasanuddin misalnya, beberapa hari yang lalu memfasilitasi pencairan kredit lunak tersebut kepada puluhan pengusaha super mikro di kota Makassar.

c. Bantuan di Bidang Penerapan Protokol Kesehatan.

Keterlibatan TNI AD dalam penanggulangan Covid-19 semakin dikukuhkan dengan masuknya Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai wakil ketua pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihian Ekonomi Nasional. TNI mendapat mandat menjaga kepatuhan, ketataan, dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Pelibatan TNI AD dalam pendisiplinan penerapan protokol kesehatan tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah pada 4 Agustus yang lalu. Inpres itu ditujukan untuk para menteri, sekretaris kabinet, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga, dan kepala daerah.

Dalam Inpres tersebut Panglima TNI mendapat tiga poin tugas, yakni untuk: (a) memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan TNI untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat; (b) bersama Kapolri dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; dan (c) melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Inpres itu memberikan dukungan kepada pengusaha sipil seperti gubernur dan bupati/wali kota, dalam mengawasi dan melaksanakan protokol kesehatan di masyarakat. Artinya, TNI tidak bergerak sendiri secara institusional, tetapi di bawah koordinasi dan perintah pemerintah daerah setempat. Luasnya unit wilayah yang harus diawasi pemerintah menjadikan pelibatan

TNI AD menjadi hal yang wajar. Ada 15 jenis lokasi yang harus diawasi dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang harus dilakukan pemerintah daerah, ini tentu membutuhkan sumber daya yang banyak.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, pelibatan TNI AD yang memiliki struktur organisasi hingga ke pelosok negeri merupakan upaya maksimal agar masyarakat mengerti pentingnya menjaga kesinambungan pemulihian kesehatan dan kebangkitan ekonomi. Anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal mendukung keputusan Presiden Jokowi melibatkan TNI/Polri dalam upaya penanganan serta pencegahan Covid-19 di masyarakat. Menurut Iqbal keikutsertaan TNI AD diharapkan dapat mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan aturan protokol kesehatan dengan lebih ketat. Hal ini perlu dilakukan jika kita menginginkan jumlah pasien Covid-19 berkurang, karena sampai saat ini tidak semua masyarakat yang mematuhi aturan protokol kesehatan. Keterlibatan TNI AD dalam penanganan Covid-19 telah eksis di banyak ranah. Ketika Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dari pusat sampai di daerah, TNI AD sudah terlibat aktif. Pada tingkat provinsi yang ada Kodam, maka Pangdam setempat terlibat sebagai unsur ketua pada Gugus Tugas tingkat provinsi yang otomatis dijabat oleh gubernur. Pada bulan Juni lalu TNI membentuk Komandan Gabungan Tugas Terpadu (Kogasgabpad) dan di tingkat Kodam juga dibentuk Kogasgabpad. Ratusan personel Kodam, Korem, dan Kodim diterjunkan ke ruang-ruang publik untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama memakai masker, menjaga jarak fisik (physical distancing) dan mencuci tangan. Personel Kogasgabpad TNI AD masuk ke pasar-pasar tradisional mengimbau masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Banyak juga di antara mereka masuk di mal-mal, toko-toko besar, mini market, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Keterlibatan TNI AD dalam mendisiplinkan masyarakat dalam

menerapkan protokol kesehatan memang sangat dibutuhkan karena lemahnya disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, baik karena faktor budaya maupun karena adanya sikap apatis yang menganggap Covid-19 itu tidak ada. Selain melalui kegiatan tersebut, TNI AD juga gencar mengkampanyekan pencegahan Covid-19 melalui program nonfisik pada TMMD ke-108 yang baru saja berakhir pada 29 Juli yang lalu.

Kampanye pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh personel TNI AD telah berlangsung secara masif dengan cakupan geografis yang sangat luas karena dilakukan dari tingkat provinsi, kabupaten/ kota, hingga tingkat desa dan kelurahan.

Para Babinsa yang bertugas di desa-desa secara rutin melakukan kampanye pendisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerah tugasnya masing-masing. Kita tentu berharap bahwa keterlibatan TNI AD dalam penanggulangan Covid-19 membawa hasil yang signifikan.

Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan : (1) Keterlibatan TNI dalam penanggulangan Covid-19 mengacu pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya mengenai tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang; (2) Keterlibatan TNI AD dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 bersifat dua arah, yakni secara internal prajurit TNI AD harus berjuang agar Covid-19 tidak menyebar di lingkungan TNI AD, sedangkan secara eksternal prajurit TNI berupaya mencegah penyebaran Covid-19 di kalangan masyarakat umum sehingga mata rantai penyebaran Covid-19 dapat diputuskan; (3) Keterlibatan TNI AD dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 secara garis besar terbagi ke dalam tiga ranah, yakni dalam bidang medis, pada pembagian bantuan sosial dan logistik, dan pendisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Saran

Satuan-satuan kewilayahan di tingkat Kodim perlu membuat panduan sederhana tentang penerapan protokol kesehatan yang dapat dibagikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda sehingga dapat menjadi penyambung informasi sosialisasi yang dapat membantu memperluas cakupan sosialisasi yang telah dilakukan oleh para Babinsa.

Referensi.

- BPS RI. 2020. Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19. Jakarta : BPS RI. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). Revisi V, Juli 2020. Jakarta : Kemenkes.
- Haripin, Muhammad. 2020. "Dampak Politik-Keamanan Covid-19". Diakses dari [http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/13898/dampak-politik-keamanan-covid-19.\(26-08-2020\).](http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/13898/dampak-politik-keamanan-covid-19.(26-08-2020).) <http://koranbogor.com/berita/politik/langkah-konkrtni-bantu-penanganan-covid-19-di-indonesia/> (Diakses, 26 08 2020).
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/335086-pel-tni-keseriusan-perangi-covid-19.> (Diakses, 26 08 2020).
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kolonel Inf Drs. Yamin merupakan Abituren Sepa PK 1995 dan lulusan Dikreg XLIX Seskoad tahun 2011, Saat ini menjabat sebagai Dosen Madya Seskoad.



Major Inf Imam Buchori

PERANG YOM KIPPUR 1973 SEBUAH MEMOAR YANG DIACUHKAN

Pendahuluan.

Perang enam hari yang terjadi pada tahun 1967 antara Israel dan negara-negara Arab (Mesir, Suriah, dan Yordania) berakhir dengan kemenangan Israel. Dampaknya, wilayah Israel dua kali lebih luas dari wilayah semula setelah menguasai Semenanjung Sinai, Jalur Gaza, Dataran tinggi Golan, dan Yerussalem Timur. Hal berbeda dialami oleh negara-negara Arab khususnya Mesir yang tidak terima dengan dikuasainya Semenanjung Sinai. Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser menyimpan impian untuk membalaskan dendam negaranya akibat kekalahan dalam perang enam hari tersebut. Rencana dan cita-cita Nasser dalam membalaskan kekalahan Mesir akhirnya diwujudkan oleh Saddat dalam Perang Yom Kippur.

Mencermati dari apa yang terjadi di atas, penyebab Perang Yom Kippur adalah sebagai bentuk balas dendam Mesir yang dipendam oleh Nasser setelah kalah telak dalam perang enam hari di tahun 1967 yang diwujudkan oleh Anwar Saddat. Penulis memilih Perang Yom Kippur sebagai salah satu bahasan karena mengandung nilai-nilai kemiliteran yang dapat diterapkan dalam berbagai bentuk peperangan. Adapun dalam penulisan esai ini, penulis menggunakan metode yang bersifat analisis

deskriptif didasarkan pada studi pustaka dengan memanfaatkan berbagai literatur yang ada. Melalui tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan nilai guna pribadi berupa pengalaman menganalisis permasalahan dalam perspektif akademis dan diharapkan bisa menambah referensi pembahasan terkait sejarah perang Yom Kippur yang terjadi antara Israel dengan Mesir dan Syria.

Selanjutnya penulis bermaksud memberikan gambaran tentang Perang Yom Kippur dan *lesson learned* yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Adapun tujuannya adalah sebagai sumbangsih pikir bagi lembaga pendidikan Seskoad sebagai sarana untuk menambah wawasan para serdik tentang berbagai sejarah perang di dunia yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Ruang Lingkup pembahasan esai ini mengacu pada peristiwa terjadinya Perang Yom Kippur antara Israel dengan Mesir dan Syria.

Pembahasan

Setelah melalui rencana yang matang, Mesir siap untuk melancarkan serangannya terhadap Israel tepat pada perayaan Yom Kippur yang merupakan hari suci umat Yahudi.

Definisi Yom Kippur diambil dari bahasa Ibrani yang berarti hari pengampunan dosa (dalam bahasa Arab Yaumul Ghufro:n). Perayaannya dilaksanakan pada tanggal sepuluh bulan Tishri dalam kalender Yahudi. Pada hari suci ini, kegiatan masyarakat Israel diliburkan termasuk sebagian unsur pasukan militernya untuk menuju ke Synagoge dalam rangka beribadah. Kemudian di tengah keadaan tenang ini, muncullah serangan yang tidak diduga dilancarkan oleh pasukan gabungan dari Mesir dan Syria yang membuyarkan situasi sakral umat Yahudi. Tujuan perang ini bagi Mesir adalah merebut kembali Semenanjung Sinai sedangkan Syria menginginkan Dataran Tinggi Golan yang jatuh ke tangan Israel pada saat Perang tahun 1967.

Dalam menyiapkan peperangan tersebut, Gamal Abdul Nasser yang dilanjutkan oleh Anwar Sadat tidak main-main. Dia menyusun strategi besar untuk menghadapi kekuatan udara dan darat Israel yang cukup tangguh saat itu. Kekalahannya dan kelemahan Mesir pada Perang 1967 maupun selama Perang Atrisi 1968-1970 tidak boleh terulang. Untuk mencapai tujuannya, Kairo menjalin hubungan diplomatik dan militer yang sangat kuat dengan Moskow. Hal ini ditunjukkan dengan mengalirnya dukungan militer baik berupa pasukan dan peralatan militer paling canggih yang dimiliki Uni Soviet saat itu. Dukungan perangkat keras militer dari Rusia meliputi pesawat MIG-21, rudal darat ke udara (SAM) S-2 dan S-3, Artilleri, Tank dan kendaraan tempur lainnya termasuk para awak dari Rusia. Mesir juga mendatangkan ponton dan mesin semprot jet air dari Jerman guna mendukung operasinya untuk menerobos baris pertahanan *Bar-Lev Line*.

Selain melengkapi peralatan militer dari Rusia, menjelang ofensifnya, Anwar Sadat memerintahkan militernya untuk tetap melaksanakan perang Atrisi di perbatasan

Terusan Suez dan mengganggu garis pertahanan Israel. Perang Atrisi ini menjadi sangat penting karena sebagai sarana bagi Anwar Sadat untuk menguji kemampuan militernya dalam menguasai peralatan militer

yang masih cukup baru serta menyamarkan niat sesungguhnya dari Mesir. Tipu muslihat yang dilancarkan oleh Mesir ini cukup berhasil dimana pimpinan Israel memandang sebelah mata kapabilitas militer Mesir. Selain kemenangan besar yang telah diraih pada Perang Enam Hari, Israel juga beberapa kali berhasil melakukan serangan raid ke instalasi strategis Mesir selama perang Atrisi tanpa mampu diantisipasi oleh Mesir. Berbekal dari situasi dan kondisi yang ada, Israel sangat yakin bahwa kekuatan militernya akan dengan mudah menghancurkan militer Mesir sekalipun telah mendapatkan banyak bantuan militer dari Rusia.

Dua hari sebelum perang, Mesir mempersiapkan penyerangan jarak dekat secara diam-diam. Rencana ini sebenarnya sudah tercium oleh Mossad, Badan Intelijen Israel. Sayangnya himbauan Mossad tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh para petinggi Israel. Mereka terkecoh oleh pernyataan media massa maupun asumsi dari para pemimpinnya bahwa pasukan Mesir tidak akan sanggup mengalahkan Israel setelah Perang Enam Hari. Pada 4 Oktober 1973, media massa Mesir telah memobilisasi 20.000 pasukan cadangannya. Untuk mengecoh Israel, pasukan khusus Mesir diperintahkan menyeberangi Suez tanpa helm, senjata dan pakaian tempur. Mereka menyeberang sambil memancing dan makan jeruk.

Dan hari yang dinanti pun tiba. Pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 1973 bertepatan dengan bulan Ramadhan, Israel mendapatkan serangan kejutan dari Mesir dan Syria dari dua front yang berbeda yaitu utara dan selatan. Bersamaan dengan gempuran artilleri yang gencar, Panglima tentara Mesir Mohamed El Gamasy mengklaim pasukannya melepaskan 10.000 lebih tembakan pada menit-menit pertama gelombang tentara Mesir melintasi Terusan Suez menggunakan perahu dinghy dan menyerbu benteng pasir Bar-Lev Line sambil bertakbir. Dalam upaya menaklukkan posisi Israel yang secara luas diyakini tidak dapat ditembus itu, tidak banyak korban jatuh di pihak Mesir.

Para komandan Israel pun mendengarkan dengan rasa tidak percaya saat tentara mereka di benteng Yom Kippur menyembunyikan tanda peringatan dan menyatakan posisinya tak dapat dipertahankan di hadapan pasukan musuh. Tank-Tank Suriah menyerbu Israel dan menekan jauh ke Dataran Tinggi Golan. Angkatan udara Mesir dan Suriah merangsek ke dalam wilayah Israel untuk menyerbu sejumlah pos militer utama. Ketika militer Israel bergegas meluncurkan pasukan angkatan udara, jet tempur mereka dicegat rudal SAM Soviet begitu mencapai garis depan. Hilang sudah bayangan kemenangan udara Israel pada Perang 1967. Tank-tank Israel yang dikirimkan untuk membantu di sepanjang Bar - Lev Line pun menghadapi kejutan serupa. Mereka menghadapi Infanteri Mesir yang dipersenjatai peluru kendali anti Tank bikinan Soviet yang menghancurkan sekian banyak unit lapis baja Israel.

Dalam minggu pertama terjadinya perang, kondisi Israel terlihat memburuk hari demi hari. Serangan balasan yang mereka lancarkan gagal. Pihak Syria dan Mesir sepertinya bertempur dengan semangat juang yang sangat tinggi. IDF (*Israeli Defence Force*, Tentara Pertahanan Israel) menderita kekalahan besar. Pasukan-pasukan Artilleri dan peluru-peluru kendali dari darat ke udara dijadikan payung oleh pasukan Mesir yang terus bergerak maju dan satu langkah brilian tentara Mesir dilakukan dengan berhasil, yaitu dinding-dinding Israel dibanjiri dengan air dari Terusan Suez dan Benteng Bar Lev ikut hancur secara cepat. Persiapan Mesir dalam Perang Yom Kippur dapat dikatakan sudah cukup matang dalam rencana penyerangan awal. Rencana peperangan yang didukung oleh beberapa pihak membuat serangan awal Mesir menuai kesuksesan. Perang yang berlangsung selama 16 hari ini mengejutkan warga Israel yang sedang merayakan ibadahnya. Ketidaksiapan militer dan persenjataan Israel membuat keyakinan pasukan Arab kuat akan datangnya kemenangan.

Memasuki hari keempat peperangan, Israel mulai kehabisan cadangan persenjataan. Hal ini diantisipasi dengan meminta bantuan ke Amerika berupa persenjataan yang mendukung perang. Amerika mengabulkan permohonan Israel dan mengirimkan persenjataan yang dapat menandingi rudal-rudal Soviet. Sehari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1973 Washington mengizinkan diadakannya jembatan udara untuk suplai militer ke Israel setelah Uni Soviet mengirimkan suplai persenjataan tambahan ke Mesir. Israel dengan sukses menyerang pasukan Mesir yang sudah bergeser ke luar jangkauan perlindungan payung rudal permukaan ke udara. Israel sudah menguasai kembali sebagian besar wilayah di bagian selatan Dataran Tinggi Golan. Pesawat-pesawat Israel berhasil dirontokkan oleh Syria hingga melewati jalur pipa minyak yang membentang dari kawasan Dataran Tinggi Golan, Syria dan Yordania. Setelah melewati pipa-pipa minyak tersebut, esok harinya pasukan infanteri Syria, Syria 5th Infanteri Division terus bergerak maju dan berada hanya sepuluh kilometer sebelah tenggara Juhader.

Pada 11 Oktober 1973, Israel menyerang Syria dari posisinya di Dataran Tinggi Golan. Duta Besar Uni Soviet untuk Amerika Serikat, Anatoly Dobrynin, mengatakan pada Menteri Luar Negeri Amerika, Henry Kissinger bahwa pasukan udara Soviet sudah bersiaga untuk mempertahankan Damaskus. Kissinger memperingatkan Dobrynin bahwa jika Soviet mengirimkan pasukan ke Timur Tengah, Amerika Serikat juga melakukan hal serupa. Pada 12-13 Oktober 1973, Amerika mengirimkan persenjataan tambahan ke Israel. Tiga hari kemudian, tepatnya 16 Oktober 1973 pasukan Israel pertama menyeberangi Terusan Suez. Presiden Mesir Anwar Sadat meminta Uni Soviet untuk melibatkan PBB dan mengupayakan gencatan senjata. Dua minggu setelah Mesir dan Syria berhasil mengalahkan Israel, menghancurkan Tank-Tank Israel di Dataran Tinggi Golan, Israel

bahkan berhasil menggempur Syria sampai ke Damaskus.

"As casualties mounted and both sides suffered staggering losses, the superpowers entered the arena. The Soviet Union began to resupply the Arab States with ammunition and light weapons. When the United States decided to do the same for Israel, The Soviet Union escalated its supply operations to Tanks and planes. This too was matched by The United States"

Pada saat pertempuran memuncak, Amerika Serikat dengan cepat memperkuat persenjataan Israel dengan melakukan airlift operation (operasi pengangkutan udara) ke Israel. Hal tersebut diimbangi pihak Uni Soviet yang juga membantu persenjataan Mesir dari udara. Namun pada akhirnya, Israel dengan bantuan senjata dari Amerika berhasil membalikkan keadaan. Dengan keberhasilan-nya membungkam baterai SAM Mesir dan Tank-Tank Syria, Israel membuka jalan menghancurkan hampir seluruh aliansi Arab yang turut bertempur seperti Irak, Yordania dan Maroko. Biaya yang mahal harus ditanggung Mesir sebagai pemrakarsa perang dengan jumlah korban dan kerugian yang paling besar diantara negara-negara yang terlibat perang dan dampak ekonomi yang panjang di dalam negeri. Namun, di balik itu terdapat suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Israel, sebagai negara kecil yang kerap kali menang perang melawan negara-negara Arab ternyata dapat dibuat tak berdaya jika tidak mendapat bantuan dari Amerika.

Pada tanggal 16 Oktober 1973, Presiden Sadat mengimbau suatu gencatan senjata dan penarikan mundur pasukan Israel dari seluruh wilayah Arab yang didudukinya pada tahun 1967. Segera setelah itu Menteri Luar Negeri Amerika, Henry Kissinger terbang ke Moskow menemui Sekjen Partai Komunis, Leonid Breznev untuk membicarakan pentingnya kedua negara besar (Amerika dan Uni Soviet) mendukung gencatan senjata.

Dewan keamanan PBB mendeklarasikan cease-fire (gencatan senjata) dan mengeluarkan Resolusi 33810. Pada 24 Oktober 1973 mulai diberlakukan gencatan senjata dan perang benar-benar berhenti

pada tanggal 26 Oktober 1973.

PENUTUP.

Perang Yom Kippur adalah perang bersejarah Mesir atas kemenangan strateginya melawan Israel. Serangan Mesir ke Israel bersamaan pada hari suci Yom Kippur membuat militer Israel kewalahan. Ketidaksiapan Israel terhadap serangan kejutan Mesir adalah sebuah bukti bahwa Israel bukanlah negara yang tidak terkalahkan. Bantuan Syria dan negara Arab lainnya selama peperangan membuktikan bahwa Israel dapat dihadapi dengan persatuan yang kuat. Pada akhirnya superioritas militer Israel terhadap lawannya juga tidak dapat dipungkiri. Walaupun kedua belah pihak mendapat dukungan alutsista yang relatif seimbang, Israel pada akhirnya dapat membalikkan kekalahan. Kekuatan mental, ketangguhan, dan kompetensi serta kemahiran strategi pasukan Israel menjadi faktor penentu hasil akhir peperangan.



Perang Yom Kippur, tentara Mesir berhasil menguasai Semenanjung Sinai

Beberapa hal yang dapat menjadi *lesson learned* dari Perang Yom Kippur diantaranya adalah : 1) Operasi-operasi pengelabuan yang dilakukan oleh Mesir selama fase Perang Atrisi telah mengakibatkan Israel menjadi lengah dan gagal mengantisipasi adanya serangan kejutan. Dalam peperangan setiap informasi adalah vital dan akan diklasifikasikan sesuai dengan tingkat validitasnya. Kekalahan Israel dalam perang Yom Kippur adalah bukti bahwa pengacuhan informasi terkait lawan yang dihadapi harus ditebus dengan harga yang sangat mahal.

2) Kombinasi antara kekuatan Artilleri, pasukan darat dan payung pertahanan udara yang kuat telah meniadakan supremasi udara Israel sehingga pasukan Mesir berhasil menguasai sisi timur Terusan Suez dengan cepat. 3) Serangan cepat yang disertai dengan unsur pendadakan menjadi senjata yang sangat ampuh dan mematikan dalam memenangkan pertempuran. Dalam setiap peperangan di belahan dunia ini, kerahasiaan, kecepatan dan pendadakan merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan kemenangan yang sampai dengan saat ini menjadi doktrin di berbagai pusat kesenjataan di jajaran TNI AD. 4) Kelihian Presiden Anwar Sadat dalam merumuskan strategi perang yang meliputi kekuatan militer, kemampuan diplomasi, kemampuan intelijen serta ekonomi yang kuat telah memberikan posisi tawar yang terhormat bagi Mesir dalam perseteruannya dengan Israel. Hal ini menunjukkan bahwa kelihian dan kecermatan seorang pemimpin dalam menerapkan strategi perangnya sangat menentukan dalam mencapai kemenangan. Pembalasan kekalahan pada Perang Enam Hari dinilai berhasil oleh kalangan Arab dan dunia. Presiden Anwar Sadat berhasil menarik simpati dunia internasional mengenai masalah perbatasan. Anwar Sadat terbukti mampu menggalang persatuan negara Arab selama beberapa waktu dan berdampak besar bagi dunia. Sebagai bukti solidaritas, negara-negara yang tidak berperang mengambil tindakan untuk mengembargo negara-negara pendukung Israel.

Daftar Pustaka

Buku

- ❑ Edition Assouline. Les symbols du Judaïsme. New York: St. Martin's Press, 1997
- ❑ Edisi Angkasa Edisi Koleksi XLII The Yom Kippur War October 1973, Gramedia. Jakarta, 2007
- ❑ John G. Stoessinger. Why Nation Go to War. New York St. Martin's Press: 1993
- ❑ Ron david. Arab Israel untuk Pemula. Yogyakarta: Resist Book, 2007
- ❑ R. Garaudi: Kasus Israel Studi tentang Zionisme Politik. Terj. Hasan Basari, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- ❑ Oktorino : Perang Demi Perdamaian Kisah Perang Yom Kippur 1973, Jakarta : Eleksmedia Competindo, 20014
- ❑ General Saad El Sazly : Peristiwa Penyeberangan Terusan Zues, American Med East Research San Fransisco, 2003.

Website

- ❑ <http://dewitri.wordpress.com/2009/01/03/resolusi-konflik-arab-israel> diakses pada tanggal 27 oktober 2020
- ❑ <https://tirto.id/perang-yom-kippur-ketika-mesir-menyerbu-israel-di-bulan-ramadan> diakses pada 8 Nopember 2020
- ❑ <https://republika.co.id/berita/qfvu4k320/perang-yom-kippur-lawan-israel-sadat-perdaya-suriah> diakses pada tanggal 8 Nopember 2020

Mayor Inf Imam Buchori, Abituren Akmil 2006 dan lulusan Dikreg LIX seskoad Ta 2020





Major Inf Ade Sohali

ANALISIS STRATEGI DALAM SEJARAH PERANG KOREA TAHUN 1950 – 1953 : KEBERHASILAN STRATEGI PERANG DI INCHEON

Pendahuluan.

Pecahnya Korea menjadi dua wilayah, dipengaruhi faktor eksternal yang menjadi salah satu faktor dalam mengawali lahirnya Perang Dingin, yaitu rivalitas antara Amerika Serikat (US) dan Uni Soviet (USSR). Rivalitas dua negara besar (Bipolar Great Power) tidak hanya terlihat di Eropa ketika Jerman pecah menjadi dua; Jerman Barat dan Jerman Timur, namun juga berdampak di Asia Timur yaitu pemisahan Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara yang mendapat pengaruh besar dari kekuasaan komunis USSR dan Korea Selatan yang mendapat pengaruh dari blok Liberalis Barat. Ketika Perang Dingin berakhiri yang ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin (Jerman) pada tahun 1989 telah menunjukkan berakhirnya pula rivalitas ideologis antara US dan USSR di daratan Eropa, tetapi gejala tersebut tidak sampai pada kawasan Asia Timur, lebih tepatnya di Semenanjung Korea, dimana berakhirnya Perang Dingin tidak mengakhiri perpecahan wilayah Korea. Antara Korea Selatan dan Korea Utara tidak menunjukkan gejala untuk menjadi Negara Korea yang bersatu seperti yang terjadi di Jerman. Seperti yang telah Penulis jelaskan di atas bahwa perang Korea merupakan proxy war, yang bukan suatu hal yang mustahil akan

terjadi lagi perang dengan jenis ini tak terkecuali di Indonesia. Keberhasilan Jenderal Doughlas MacArthur dalam mengatur strategi perang di Incheon dengan kode operasi "Chromite" sehingga sampai saat ini disebut sebagai maha karya terbesar dalam strategi perang, dimana faktor kepemimpinan militer merupakan penyumbang utama dari keberhasilan suatu operasi dalam perang.

Maka dari itu, dengan mengkaji lebih lanjut mengenai sejarah perang Korea khususnya dalam menganalisis strategi perang yang digunakan dan juga faktor kepemimpinan militer yang akan menawarkan pelajaran penting untuk menjaga stabilitas di kawasan regional maupun nasional.

Berlandaskan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa persoalan sebagai berikut : (1) Analisis strategi dan kepemimpinan Jenderal Doughlas MacArthur pada Perang Korea di Incheon; 2) Lesson Learned dari perang Korea di Incheon. Sehingga dari persoalan yang ada dapat dibuat suatu rumusan masalah yang muncul yakni :

"Bagaimana Analisis Strategi dalam Sejarah Perang Korea Tahun 1950 – 1953 ?"

Tujuan dari penulisan esai ini yaitu sebagai sumbang pemikiran kepada Komando Atas dalam rangka memberikan upaya dan solusi yang mungkin dilakukan dalam menghadapi ancaman perang di masa yang akan datang dengan dihadapkan pada kondisi lingkungan strategis yang terus fluktuatif dan berkembang dengan menggunakan pendekatan historis.

Pembahasan

Perang Korea di Kota Incheon dengan kode operasi "Chromite" dapat mencapai kemenangan karena kesuksesan pemimpin militer dalam mengatur strategi dan memposisikan diri dalam suatu operasi di masa mendatang. Sejak awal sebelum pecahnya perang di Incheon, pemimpin militer dari Amerika Serikat Jenderal Doughlas MacArthur berkonsentrasi pada strategi yang digunakan untuk masa yang akan datang tentang bagaimana memotong jalur operasi yang diperluas di Korea Utara. 1 Jenderal Doughlas MacArthur tidak berfokus pada kegagalan dari operasi sebelumnya atau pertempuran kontemporer di sepanjang pertahanan Sungai Nakdong.

Meskipun Amerika Serikat tidak menjelaskan dan mengkodifikasi konsep strategi dalam doktrin selama Perang Korea, Jenderal Doughlas MacArthur memahami pentingnya mengantisipasi operasi di masa depan. Sehingga, perang Incheon dapat membawa hasil kemenangan dan diabadikan sebagai mahakarya strategi perang dari kepemimpinan militer Jenderal Doughlas MacArthur.

Analisis Strategi Perang dan Kepemimpinan Jenderal Doughlas Mac Arthur dalam Perang Korea di Incheon

Strategi perang dengan kode operasi "Chromite" sangat dipengaruhi oleh pengalaman strategi operasional amfibi pada Perang Dunia II sebelumnya, yang sampai saat ini sering dipakai dalam operasional tempur dari Amerika. Konsep operasi "Blueheart" memberikan dasar untuk strategi perang dengan melakukan pendaratan di Incheon.

Pendaratan di Incheon telah dipertimbangkan oleh pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama minggu pertama pada bulan Juli tahun 1950. Namun, strategi dengan kode operasi "Bluehearts," kemudian tidak digunakan pada 10 Juli karena ketidakmampuan Republik Korea dan pasukan AS untuk menahan serangan musuh ke selatan.

Berdasarkan data dan fakta yang Penulis pelajari, bahwa Operasi Chromite mewakili seni perang operasional Amerika dengan menggunakan strategi penghancuran. Jenderal Doughlas MacArthur melakukan gerakan memutar garis luar untuk menghancurkan musuh. 4 Strategi dengan pendekatan agresif ini mewakili praktik Amerika dalam menggunakan strategi pemusnahan sebagai cara perang, dan strategi penghancuran, atau pemusnahan ini merupakan strategi yang digunakan dan menjadi andalan bagi Jenderal Doughlas MacArthur dalam perang Korea. Hal ini karena Jenderal Doughlas MacArthur berpikir bahwa kecepatan adalah fondasi kemenangan dan bahwa Amerika Serikat harus menghancurkan militer Korea Utara sesegera mungkin.⁶ Pendekatan agresif ini merupakan penyempurnaan dari peperangan reguler pada Perang Dunia II, yang membentuk fokus dasar utama strategi perang Amerika Serikat. Dari gerakan memutar di laut, pasukan PBB mampu memutuskan jalur komunikasi Korea Utara. Area Incheon-Seoul adalah kerentanan kritis pusat gravitasi operasional Angkatan Darat Korea Utara. Pada 25 September 1950, pasukan PBB berhasil merebut Seoul setelah melewati perang dari rumah ke rumah yang sangat brutal. Selain itu, keberhasilan pendaratan di Incheon memicu keberhasilan pasukan angkatan darat AS ke-8 menerobos Pusan Perimeter dan memaksa NKPA melakukan gerak mundur yang panjang ke utara. Keberhasilan pasukan PBB ini berlangsung hingga November 1950 ketika akhirnya pasukan China datang membantu NKPA yang mendesak pasukan PBB kembali ke wilayah selatan. Dalam pendaratan Incheon sendiri, sebanyak 566 personel pasukan PBB

tewas dan 2.713 orang lainnya terluka, sementara dari pihak NKPA sebanyak 35.000 personel tewas, terluka, atau tertangkap.

Banyak kalangan menganggap Pertempuran Incheon ini adalah salah satu pertempuran paling menentukan dalam Perang Korea. Sementara itu, banyak sejarawan menilai keberhasilan pendaratan Incheon ini merupakan salah satu mahakarya strategi perang sepanjang sejarah modern.

Kemudian, berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan di atas muncullah harapan dan keinginan. Adapun harapan dari Penulis mengenai strategi dan kepemimpinan pada Perang Korea di Incheon adalah dapat menjadi lesson learned bagi para pemimpin di lingkup TNI AD. Selanjutnya, dihadapkan pada berbagai ancaman yang akan dihadapi Indonesia, baik itu ancaman aktual maupun potensial, tentunya strategi perang yang baik harus direncanakan dengan matang dari sekarang dan juga kepemimpinan yang baik harus diasah.

Maka dari itu, dapat dilakukan suatu analisis dengan menggunakan dasar dari buku petunjuk dan juga teori maupun konsep yang sesuai, yaitu teori strategi perang dan juga teori kepemimpinan. Dalam teori strategi perang menurut Scott Sigmund Gartner dalam bukunya yang berjudul Strategic Assessment in War, dijelaskan bahwa strategi yaitu seperangkat gagasan yang diterapkan oleh militer untuk mengejar tujuan strategis yang diinginkan. Strategi perang juga berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kampanye, pergerakan dan disposisi kekuatan, dan penipuan musuh. Dalam perang Korea di Incheon, Jenderal Doughlas MacArthur menggunakan strategi penghancuran musuh secara total, strategi tersebut terbukti berhasil melumpuhkan kekuatan lawan di Kota Incheon sehingga tujuan strategis yang diinginkan oleh pihak Amerika Serikat dapat terwujud. Kemudian dalam teori kepemimpinan menurut Georger R. Terry dijelaskan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan

bersama. Dalam hal kepemimpinan militer dikaitkan dengan kepemimpinan dari Jenderal Doughlas MacArthur, dia dapat mempengaruhi militer, mempolitisi Amerika Serikat, dan juga PBB sehingga dapat berkolaborasi dalam melaksanakan operasi "Chromite" dengan melakukan taktik amfibi secara besar-besaran di Kota Incheon sehingga tujuan untuk memenangkan pererangan di Korea dapat tercapai.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam perang di Korea adalah masih adanya arogansi dari pemimpin militer Amerika Serikat, khususnya dari Jenderal Doughlas MacArthur itu sendiri karena tidak mau mendengarkan pendapat dari PBB yang mengingatkan akan adanya kekuatan militer China di perbatasan Korea sehingga mengakibatkan pasukan PBB tidak bisa leluasa masuk membantu Amerika Serikat dalam pertempuran sebelumnya. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan pelajaran bagi para pemimpin maupun calon pemimpin militer di Indonesia, bahwa sifat terlalu percaya diri dan arogansi dapat berakibat fatal dalam suatu penugasan.

Lesson Learned dan nilai-nilai kepemimpinan dari Perang Korea di Incheon

Dari penjelasan mengenai analisis strategi perang dan juga kepemimpinan dari Jenderal Doughlas MacArthur diatas, dapat dipetik suatu pelajaran (*lesson learned*) yang akan berguna bagi militer saat ini apabila dihadapkan pada pertempuran yang serupa atau bahkan lebih hebat. Pelajaran yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Jangan berfokus pada satu ancaman besar saja. Ahli strategi tidak seharusnya memprioritaskan dan mencurahkan sumber daya paling banyak untuk melawan ancaman terbesar saja. Namun di sisi lain, strategi yang baik tentunya tidak boleh berkompromi pada setiap bahaya apa pun yang mengancam kepentingan nasional.⁸

Pelajaran ini sangat penting untuk menghadapi persaingan kekuatan besar

pada lingkungan strategis saat ini. Meskipun saat ini China mungkin menjadi perhatian terbesar karena konflik di Laut Natuna Utara, kita tidak boleh mengabaikan kekuatan dari Amerika yang ingin mengimbangi kekuatan China di Laut China Selatan sehingga berbagai upaya termasuk melobi tingkat tinggi untuk menjadikan Indonesia sebagai pangkalan militer bagi Amerika. Pengaruh China dan Amerika merupakan suatu aktivitas stabilisasi keamanan yang bersifat global. Sehingga, Indonesia sudah seharusnya melihat berbagai potensi ancaman yang ada dari berbagai negara lain selain Amerika dan China, sesuai dengan cita-cita nasional Indonesia yang memiliki kepentingan kritis dan tanggung jawab menjaga perdamaian di seluruh dunia.

b. Jangan terlalu arogan. Salah satu pelajaran terpenting dari Perang Korea adalah bahwa terkadang kesombongan adalah musuh terbesar kita. Dalam buku berjudul, *The Beautiful Country and The Middle Kingdom*, John Pomfret menulis bahwa China telah memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak melewati paralel ke-38.

Karena China dan Amerika Serikat belum menjalin hubungan diplomatik formal pada saat itu, China memilih Duta Besar India untuk China, K. M. Panikkar, untuk memberi tahu Amerika Serikat bahwa jika pasukan AS menginvasi Korea Utara, China akan dipaksa untuk campur tangan. Para petinggi politik, intelijen, dan juga militer termasuk Jenderal Doughlas MacArthur menganggap remeh respon dari China. Sehingga membuat lengah Amerika ketika China mengirim 300.000 pasukan menyeberangi Sungai Yalu untuk membantu Korea Utara melawan pasukan PBB. Hal ini tentunya dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia, bahwa setiap pergerakan musuh atau ancaman harus selalu menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian yang optimal.

c. Tidak boleh mengesampingkan "Soft Power". Memenangkan perang bukan hanya tentang sarana dan perangkat militer. Soft power adalah konsep yang dikembangkan oleh Joseph Nye dari Harvard

membentuk preferensi dan sikap orang lain melalui cara-cara non-koersif (non-militer).

Dari perang Korea kita dapat melihat bahwa propaganda yang dilakukan China kepada rakyatnya dan juga rakyat Korea Utara berhasil membuat rakyat membenci Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai "sekutu" Amerika Serikat. Kebencian yang mendarah daging ini mengakibatkan rakyatnya mendukung dan ikut berperang. Disamping itu, rakyat Korea Utara juga berpandangan bahwa Korea Selatan sedang dalam cengkeraman Amerika Serikat sehingga harus dibebaskan. Efek dari "Soft Power" yang dilakukan oleh China dan Korea Utara ini memberikan daya getar yang cukup membuat Amerika Serikat khususnya Jenderal Doughlas MacArthur sempat kewalahan sebelum pelaksanaan operasi tempur di Incheon. Maka dari itu, dapat diambil suatu pelajaran bahwa penggunaan kekuatan harus seimbang antara "Soft Power" dan "Hard Power". Adapun yang dimaksud dengan "Soft Power" dalam pertempuran dapat berupa propaganda maupun diplomasi pertahanan. Sedangkan "Hard Power" yang dimaksud adalah optimalisasi gelar pertahanan yang kuat.

Selanjutnya, keberhasilan Jenderal Doughlas MacArthur memimpin dan mengatur strategi perang Incheon dapat dijadikan pelajaran bagi para calon pemimpin militer di seluruh dunia termasuk Indonesia. Adapun pelajaran yang dapat diambil dari nilai-nilai kepemimpinan Jenderal Doughlas MacArthur adalah sebagai berikut:

a. Pemimpin harus mampu belajar dari masa lalu dan melihat peluang untuk masa depan. Jenderal Doughlas MacArthur merupakan seorang pemimpin yang mampu belajar dari masa lalu terbukti dengan penerapan operasi "BlueHeart" yang dulu digunakan dalam Perang Dunia II dan dimodifikasi menjadi operasi "Chromite" yang membawa hasil memuaskan, sehingga Perang Incheon terkenal sebagai mahakarya strategi perang setelah Perang Dunia II.

b. Harus memiliki sikap optimis. Bahkan di saat-saat tergelapnya dan mengalami banyak rintangan, Jenderal Doughlas

MacArthur selalu mempertahankan rasa optimisme. Padahal di saat manusia berada dalam keadaan sulit, sangat mudah untuk menjadi negatif. Namun, optimisme membutuhkan visi, keberanian, dan kerja keras yang tidak sedikit. Di saat mengetahui kekuatan China dalam mendukung Korea Utara yang cukup besar sehingga membuat kewalahan pasukan PBB, Jenderal Doughlas MacArthur mampu memikirkan strategi yang tepat untuk melawan kekuatan tersebut.

c. Berani mengambil sikap. Keberanian dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berani melampaui apa yang diharapkan sambil mengambil risiko dan mengambil sikap. Seperti halnya, Jenderal Doughlas MacArthur, meskipun kariernya yang panjang dan penuh penghargaan di Militer, secara mengejutkan dia berani mengambil sikap bahkan tidak mengikuti aturan baku yang berujung pada kegagalan operasi. Di sepanjang biografi yang ditulis oleh Arthur Herman, dijelaskan bahwa MacArthur lebih tertarik pada pencapaian dan penyelesaian masalah daripada mengikuti aturan yang sering kali tidak berguna.

d. Memiliki visi yang jelas. Keterampilan utama seorang pemimpin militer yang sukses adalah visi. Para pemimpin militer seharusnya dapat melihat secara realistik pada apa yang dapat dipegang di masa depan dan mempertimbangkan hal-hal yang mereka ketahui (dari pengalaman) dan hal-hal yang dapat mereka antisipasi. Visi memberikan rasa tujuan, arah, dan motivasi. Maksud dari visi yang jelas di sini adalah realitas dari seorang pemimpin dan merupakan tujuan kepemimpinan itu sendiri. Visi yang jelas juga dapat menyediakan momentum bagi kepemimpinan, dan itulah yang merupakan tujuan keberadaan kepemimpinan itu sendiri. Dalam Perang Korea ini, Jenderal Doughlas MacArthur memiliki visi yang jelas dalam hal operasional perang, yaitu melalui operasi "Chromite" dengan strategi perang amfibi di Kota Incheon dan terbukti membawa keberhasilan.

e. Memiliki ketegasan. Kemampuan untuk membuat keputusan, berpegang

teguh pada keputusan itu, dan terus maju dalam menghadapi kesulitan adalah tanda pemimpin operasional yang sukses. Jenderal Doughlas MacArthur mempunyai ketegasan dalam keputusan yang diambilnya pada Perang Korea khususnya saat merumuskan operasi "Chromite" dengan taktik perang amfibinya melakukan pendaratan besar-besaran di Kota Incheon. Maka dari itu, dengan menerapkan ketegasan atas kebenaran mengikuti prinsip loyalty to the nations ideals and the unit (prinsip militer) atau subordination of individual interest to general interest (prinsip manajemen) serta esprit de corps (semangat kesatuan dan persatuan bangsa), maka pemimpin militer dapat mencapai keberhasilan dalam setiap tugas yang dilaksanakan.

Penutup

Strategi perang dengan kode operasi "Chromite" sangat dipengaruhi oleh pengalaman strategi operasional amfibi pada Perang Dunia II sebelumnya, yang sampai saat ini sering dipakai dalam operasional tempur dari Amerika. Konsep operasi "Blueheart" memberikan dasar untuk strategi perang dengan melakukan pendaratan di Incheon. Pendaratan di Incheon telah dipertimbangkan oleh pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama minggu pertama pada bulan Juli tahun 1950. Namun, strategi dengan kode operasi "Bluehearts," kemudian tidak digunakan pada 10 Juli karena ketidakmampuan Republik Korea dan pasukan AS untuk menahan serangan musuh ke selatan. Sehingga, Jenderal Doughlas MacArthur merancang strategi dengan kode operasi "Chromite" yang mewakili seni perang operasional Amerika dengan menggunakan strategi penghancuran.

Adapun terdapat beberapa *lesson learned* yang bisa dipetik dalam sejarah Perang Korea di Incheon ini yaitu pertama, jangan berfokus pada satu ancaman besar saja namun harus bisa menyeimbangkan kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman; Kedua, jangan terlalu arogan serta cenderung meremehkan kekuatan musuh; Ketiga, jangan mengesampingkan soft power.

Selanjutnya, dalam Perang Korea di Incheon tentunya tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan Jendral Douglas MacArthur dalam mengatur strategi perang hingga dapat merebut kemenangan. Sehingga dapat diambil suatu pelajaran nilai-nilai kepemimpinan dari Jenderal Douglas MacArthur yaitu pertama, Pemimpin harus mampu belajar dari masa lalu dan melihat peluang untuk masa depan; Kedua, Harus memiliki sikap optimis; Ketiga, Berani dalam mengambil sikap; Keempat, Memiliki visi yang jelas; dan Kelima, Memiliki ketegasan.

Daftar Pustaka

Buku

- Bowdish, Randall G. 2013, *Military Strategy: Theory and Concepts*. University of Nebraska. Hlm: 172
- James F. Policy and Direction: *The First Year* (Washington, DC: Center of Military History US Army, 1992). Hlm: 145-146.

Jurnal

- US Department of the Army. Army Doctrine Publication (ADP) 3-0, Operations. Washington, DC: Government Printing Office, 2016. Dalam Dong Pil Lee, 2018. The Application of Operational Art to the Korean War. School of Advanced Military Studies, US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, KS. Hal: 27
- Ballard, R Jhon. 2001, Operation Chromite : Counterattack at Inchon. National Defense University, Institute for National Strategic Studies, 260. Fifth Avenue SW Bg 64 Fort Lesley J. McNair, Washington, DC, 20319. Hlm: 32
- Russell F. Weigley, The American Way of War: A History of United States Military Strategy and Policy (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1977), 382; Krause and Phillips, Historical Perspectives of the Operational Art, 419. Dalam Dong Pil Lee, 2018. The Application of Operational Art to the Korean War. School of Advanced Military Studies, US Army Command and General Staff College. Fort Leavenworth, KS. Hlm: 28

Internet

- Moore, Russell. 2019, 5 Things I Learned about Leadership from Studying Douglas MacArthur. Rirelevant.com, diakses melalui: <http://www.levant.com/articles/5-things-learned-about-leadership-from-douglas-macarthur-%EF%BB%BF/>
- Carafano, James Jay. 2020, 5 Lessons From the Korean War. The Heritage Foundation, diakses melalui: <https://www.heritage.org/global-politics/commentary/5-lessons-the-korean-war>
- Sulaeman, Ade. 2017, Belajar dari Perang Korea, Jika Korut Tiba-tiba Menyerang, Itu Hanya Seperti Sejarah yang Terulang. Intisari Online, diakses melalui: <https://intisari.grid.id/read/03101277/belajar-dari-perang-korea-jika-korut-tiba-menyerang-itu-hanya-seperti-sejarah-yang-terulang?page=all>
- Raleigh, Helen. 2017, 3 Lessons From The Korean War For Handling Today's North Korean
- Aggression. The Federalist, diakses melalui: <https://thefederalist.com/2017/04/26/3-lessons-korean-war-handling-todays-north-korean-aggression/>
- Carafano, James Jay. 2020, 5 Lessons From the Korean War. The Heritage Foundation, diakses melalui: <https://www.heritage.org/global-politics/commentary/5-lessons-the-korean-war>
- Hickman, Kennedy. 2019, Korean War : Inchon Landing. Thought Co. diakses melalui: <https://www.thoughtco.com/korean-war-inchon-landings-2360845>

Mayor Inf Ade Sohali, S. Sos. adalah abituren Akmil 2006, dan lulusan Dikreg LIX Seskoad TA. 2020, saat ini menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1207/BS Kodam XII/Tanjungpura.



Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.I.P., M.M.

PEMBINAAN TERITORIAL DI MASA DEPAN

Pendahuluan.

TNI AD sebagai bagian dari TNI memiliki tugas Pokok “menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara” di wilayah daratan.

Tugas TNI ke depan akan semakin berat dan sangat kompleks seiring dengan perkembangan situasi global dan dinamika lingkungan masyarakat yang semakin dinamis. Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Wujud dari tugas tersebut adalah bahwa TNI agar merefleksikan diri dan merevitalisasi pengabdian TNI ke depan secara kontekstual bagi kepentingan nasional. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI AD sangat ditentukan oleh sejauh mana efektivitas pelaksanaan pembinaan fungsi utama TNI AD yang diarahkan untuk mewujudkan penampilan fungsi pertempuran, pembinaan kekuatan, dan pembinaan teritorial (Binter).

Keselarasan antara Binter dengan Pembinaan kekuatan (Binkuat) adalah kemampuan pembinaan teritorial yang pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan profesionalitas prajurit. TNI sebagai alat dan komponen utama pertahanan negara, sudah seharusnya berkonsentrasi dan berinovasi dalam berbagai upaya membangun kesiapsiagaan guna menghadapi ancaman non-militer sebagai dampak negatif dari kecenderungan perkembangan lingkungan strategis.

Berdasarkan pernyataan di atas, TNI telah menetapkan kebijakan Optimalisasi Peran TNI, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Optimalisasi Peran TNI merupakan wujud partisipasi aktif dan kontribusi nyata TNI dalam proses pembangunan nasional pada khususnya, serta kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, yang saat ini sedang didera berbagai tantangan dan cobaan. Panglima TNI menegaskan bahwa Optimalisasi Peran TNI sama sekali bukan ekspansi TNI seperti di masa lalu, untuk mencampuri atau mengambil alih peran dan tugas pokok institusi lain. Optimalisasi Peran TNI, semata-mata merupakan panggilan moral dan fungsional TNI, dalam rangka menunaikan tugas

kemitraan atau tugas pertolongan TNI kepada institusi atau lembaga lain, sepanjang diperlukan, sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan TNI, seperti sekarang yang dilakukan dalam bentuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Manunggal KB-Kesehatan yang berlangsung cukup efektif dan memenuhi secara langsung keinginan dan kebutuhan rakyat khususnya di daerah terpencil yang kurang tersentuh pembangunan.

Sesuai hal tersebut diatas, perlu adanya suatu pembahasan yang menjadi permasalahan " Bagaimana Upaya Meningkatkan Kemampuan Dandim dalam Pembinaan Teritorial di masa depan". Adapun manfaat dan nilai guna dari tulisan ini adalah diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pimpinan dalam penentuan kebijaksanaan dalam penerapan tolak ukur keberhasilan Dandim dalam Pembinaan Teritorial di Wilayah guna meningkatkan pembinaan kemampuan Binter di masa yang akan datang. Metode dan Pendekatan yang digunakan adalah Metode deskriptif analisis yaitu dengan penelusuran kepustakaan dan mengumpulkan informasi yang faktual dan aktual dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar.

Pembahasan.

Dihadapkan pada permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa implementasi profesionalisme di bidang Binter mencakup antara lain : Pelaksanaan kemampuan intelijen teritorial, Pelaksanaan kemampuan pembinaan territorial, Pelaksanaan kemampuan penguasaan wilayah, Pelaksanaan kemampuan pembinaan perlawanannya rakyat, dan Pelaksanaan kemampuan sebagai inovator pembangunan .

Pada dasarnya keberhasilan dalam penyelenggaraan pembinaan teritorial dapat dilihat dari sejauh mana Komandan satuan Kowil mampu untuk mengaplikasikan " Sikap dan Perilaku Aparat teritorial, Kemampuan Teritorial dan

Metode-metode Binter yang telah diatur dalam buku-buku petunjuk tentang Binter guna terwujudnya RAK Juang yang tangguh dan Kemanunggalan TNI dan Rakyat dalam pemberdayaan wilayah pertahanan.

Pertama. Sikap dan Perilaku Aparat Teritorial. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai Kemerdekaan merupakan bukti nyata keberhasilan kemanunggalan TNI Rakyat dalam menciptakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat inilah yang merupakan tuntutan terhadap Komandan satuan Kowil agar senantiasa memiliki dan menerapkan hal tersebut bagi seluruh aparat teritorial disatunya untuk selalu memiliki sikap dan perilaku prajurit yang berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Sikap dan perilaku yang tercermin dari para aparat teritorial saat ini pada umumnya sudah baik, namun demikian masih terdapat sikap dan perilaku aparat teritorial dilapangan yang tidak menunjukkan identitasnya sebagai prajurit rakyat, sehingga menimbulkan image negatif oleh masyarakat terhadap keberadaan TNI ditengah masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya sikap teritorial dikalangan prajurit TNI AD , yang meliputi :

- a) Senyum Teritorial. Kondisi saat ini masih adanya sikap arrogan yang ditonjolkan aparat teritorial dalam bersosialisasi dan bergaul dengan masyarakat di wilayah teritorialnya.
- b) Tegor Sapa Teritorial. Kondisi saat ini masih adanya sikap apatis, enggan dan kurangnya kepedulian anggota insan teritorial dalam memelihara sikap bertegor sapa dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya.
- c) Saling Menghargai. Kondisi saat ini masih adanya sikap kurang saling menghargai antara aparat teritorial dengan masyarakat diwilayah binaannya.
- d) Saling Membantu. Kondisi saat ini masih adanya rasa enggan dalam membudayakan sikap saling membantu antara aparat teritorial bersama masyarakat di lingkungan sekitarnya.

- e) Gotong-Royong. Kondisi saat ini sudah mulai lunturnya semangat gotong-royong yang terjalin antara aparat teritorial dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya karena adanya sifat individualitas yang tinggi yang mempengaruhi kondisi psikologi masyarakat.
- f) Tata Krama. Kondisi saat ini masih kurangnya tata krama yang sudah menjadi budaya bangsa dalam penerapan tugas insan teritorial dalam bergaul dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya.
- g) Penyesuaian Diri / Adaptasi. Kondisi saat ini masih kurangnya penyesuaian diri dan sikap menutup diri dalam beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Kedua. Penerapan Metode Teritorial . Kondisi saat ini metode-metode Binter tersebut pada kenyataannya belum dapat diterapkan secara benar oleh Aparat Teritorial, sehingga tujuan dan sasaran Binter belum dapat diwujudkan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari hal sebagai berikut :

1) Bhakti TNI. Bhakti TNI merupakan metode Binter yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan atau lebih mengutamakan peningkatan pembangunan masyarakat. Yang mengandung aspek pertahanan. Kemampuan dari aparat Kowil dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan Bhakti TNI masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a) Tahap Perencanaan. Pada tahapan pemilihan lokasi sasaran belum adanya keterpaduan Kowil dengan unsur-unsur yang terkait, sehingga Kowil menentukan sendiri sasarnya.
- b) Tahap Persiapan. Pada tahap persiapan dalam pelaksanaan rapat koordinasi hanya dilaksanakan dalam lingkup internal Kowil tidak melibatkan unsur-unsur terkait, sehingga sering ditemukan adanya ketidaksiapan sarana dan prasarana pendukung, organisasi satuan yang terlibat belum tersusun secara baik, jadwal kegiatan serta informasi kepada masyarakat tentang adanya Bhakti TNI tidak dilaksanakan secara maksimal.
- c) Tahap Pelaksanaan. Bhakti TNI didalam pelaksanaannya terdapat keterbatasan dalam hal dukungan anggaran yang diberikan oleh Komando Atas. Keterbatasan dukungan yang ada, mengakibatkan Kowil sering bersandar kepada Pemda dan instansi yang terkait, sehingga sering mengalami hambatan karena adanya keterbatasan Pemda dan instansi terkait serta tidak adanya instruksi/petunjuk dari pusat terhadap kegiatan yang sifatnya lintas departemen;
- d) Tahap Pengakhiran. Pada tahap ini seringkali laporan ke satuan atas terlambat disampaikan, kegiatan pemantauan terhadap hasil-hasil Bhakti TNI yang telah dicapai terutama upaya tindak lanjut dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas hasil kegiatan Bhakti TNI belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pemda dan masyarakat setempat. Khusus sasaran non fisik masih jauh dari harapan dan belum mampu meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan dari masyarakat, sehingga masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
- 2) Pembinaan Ketahanan Wilayah. Merupakan pembinaan terhadap masyarakat untuk mewujudkan stabilitas ketahanan wilayah serta meningkatkan kepekaan dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk berperan menanggulangi gangguan dan ancaman yang timbul. Pembinaan ketahanan wilayah yang dilakukan oleh Satuan Kowil dihadapkan pada permasalahan yang ada yaitu kurang maksimalnya peran dari Kowil dalam membina hubungan kemanunggalan TNI dan rakyat, sehingga menimbulkan sikap

keengganan dari sebagian masyarakat untuk memberikan laporan kepada satuan Kowil, kondisi masyarakat saat ini masih belum memiliki kesadaran yang baik untuk mewujudkan keamanan lingkungan, sistem keamanan swakarsa seperti kegiatan Siskamling termasuk kebiasaan wajib lapor RT/RW bagi pendatang baru tidak lagi dilaksanakan secara efektif, sehingga banyak para kriminal, dan tokoh-tokoh teroris yang tidak terdeteksi bisa menetap dalam suatu wilayah perkampungan;

3) Pembinaan Komunikasi Sosial. Merupakan pembinaan yang mengutamakan keeratan hubungan dengan seluruh komponen bangsa sehingga timbulnya partisipasi masyarakat dalam pertahanan negara didarat. Penerapannya belum dapat dilaksanakan dengan baik dan hanya dilakukan oleh aparat Kowil secara insidentil, tidak rutin sehingga menimbulkan kesulitan bagi aparat Kowil untuk memperoleh dukungan dari warga masyarakat dalam rangka menyukseskan program Binter. Hal ini disebabkan masih adanya rasa enggan dalam membina komunikasi dengan masyarakat diwilayahnya, kurang memahami struktur sosial yang secara riil dan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat baik sistem kemasyarakatan yang berlaku, adat-istiadat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah sehingga kurang mampu berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Kondisi ini memberikan dampak masyarakat kurang merasakan manfaat ataupun peran serta aparat Kowil untuk ikut serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Ketiga, Kemampuan Teritorial . Kemampuan Teritorial aparat Kowil saat ini belum dapat mencapai apa yang diharapkan. Seharusnya aparat Kowil memiliki kemampuan sebagai berikut :

a) Kemampuan Deteksi dini, Lapor cepat, dan Cegah dini. Kemampuan deteksi dini, lapor cepat, dan cegah dini yang seharusnya mutlak dimiliki secara optimal oleh setiap aparat teritorial yang berada di wilayah, kondisi saat ini dinilai masih belum

sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terlihat dari sering terjadinya konflik yang terjadi tanpa mampu diantisipasi jauh sebelum terjadinya konflik, kondisi ini mengindikasikan bahwa para aparat teritorial belum maksimal dalam kemampuan temu cepat dan lapor cepat.

b) Kemampuan penerapan Manajemen Teritorial. Kemampuan penerapan manajemen teritorial oleh Kowil khususnya di tingkat Kodim dirasakan masih kurang maksimal, manajemen yang dilakukan oleh aparat teritorial saat ini masih berorientasi pada pembinaan rutin sesuai program, belum menerapkan manajemen modern, akibatnya pembinaan teritorial yang dilakukan masih kurang maksimal dalam tantangan tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

c) Kemampuan Penguasaan Wilayah. Kemampuan penguasaan wilayah sesuai dengan tanggung jawabnya mutlak bagi setiap aparat teritorial agar mampu mengklasifikasikan wilayah tanggung jawabnya tersebut sesuai dengan hakikat ancaman yang ada. Kondisi saat ini, aparat teritorial masih belum mampu mengidentifikasi penduduk diwilayahnya yang mungkin dicurigai dapat menjadi provokator di masyarakat dan belum mampu menguasai wilayah tanggung jawabnya dengan optimal.

d) Kemampuan Pembinaan Perlawanan Rakyat. Kemampuan penyiapan tenaga perlawanan rakyat untuk membantu TNI dalam meredam konflik yang terjadi di daerah, hingga saat ini belum terwujud secara optimal oleh para aparat teritorial yang berada diwilayah, kekuatan minimal tenaga rakyat terlatih yang harus disiapkan oleh Komando Kewilayahan hampir tidak dapat terpenuhi, kondisi yang demikian mengindikasikan bahwa aparat teritorial belum maksimal melaksanakan pembinaan perlawanan rakyat.

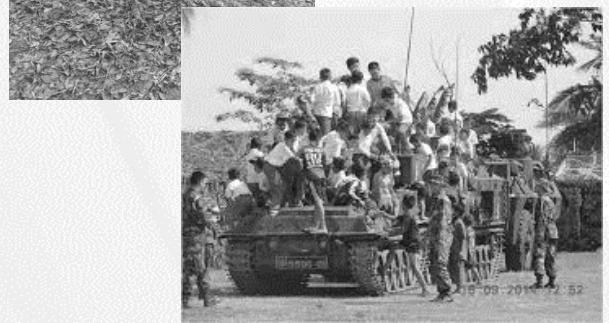
e) Kemampuan Komunikasi Sosial. Unsur pokok dalam komunikasi sosial yang terjadi saat ini adalah aparat teritorial di wilayah

khususnya Kodim, belum mampu menerjemahkan dan melakukan interaksi dalam berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik, sehingga banyaknya kebijakan-kebijakan pimpinan TNI yang tidak diketahui dengan baik oleh masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pertahanan negara, sehingga berakibat kurangnya respon positif oleh masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Binter oleh Komandan satuan Kowil pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Faktor Internal yang merupakan kekuatan adalah motivasi, semangat juang, tingkat kedisiplinan dan loyalitas Dansat Kowil dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya masih sangat tinggi. Kelemahannya tingkat intelektualitas, pendidikan spesialisasi di bidang teritorial dan pengalaman tugas yang dimiliki oleh sebagian aparat Kowil masih terbatas sehingga menyulitkan Dansat Kowil dalam membina prajuritnya dalam memahami, menguasai, dan mengaplikasikan lima kemampuan teritorial selama melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan di daerah tanggung jawabnya, serta masih adanya kegamangan dan keragu-raguan dari sebagian aparat Kowil dalam menjalankan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan.
- b) Faktor Eksternal yang menjadi peluang adalah adanya payung hukum bagi TNI AD dalam menyelenggarakan tugas Binter, kebijakan unsur pimpinan TNI AD berkaitan dengan pembinaan profesionalisme prajurit di seluruh satuan jajaran TNI AD melalui kegiatan pembinaan satuan. Kendala yang dihadapi yaitu : Peranti lunak baik berupa buku-buku petunjuk, protap maupun buku saku yang berkaitan dengan penyelenggaraan Binter belum tersusun dan disosialisasikan secara menyeluruh, tingkat pengetahuan di bidang teritorial aparat Kowil sebagian besar masih rendah, serta adanya

keterbatasan dukungan anggaran yang dialokasikan dari Komando Atas dalam mendukung program pembinaan kemampuan prajurit melalui kegiatan pembinaan teritorial.



Penutup.

Agar penyelenggaraan Binter dapat optimal membantu mengatasi semua permasalahan tersebut maka perlu adanya penyamaan visi, persepsi, dan interpretasi Dansat Kowil untuk memperoleh alternatif cara bertindak yang dapat diterapkan di wilayahnya. Diharapkan cara bertindak yang dirumuskan dapat menggambarkan keterpaduan dan terkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan/stake holder di daerah, untuk bekerja sama dalam pembinaan masyarakat yang disertai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) serta memenuhi unsur legalitas dan akseptabilitas.

Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.I.P., M.M. merupakan Abituren Akmil 1995 dan lulusan Dikreg XLVIII Seskoad tahun 2010, Saat ini menjabat sebagai Dosen Madya Seskoad.



Ny. Yani Anton Nugroho
Ketua Persit KCK Cabang Seskoad

UPAYA MEMAJUKAN PENDIDIKAN PAUD DI LINGKUNGAN SESKOAD

"Harta kalau dibelanjakan habis, ilmu kalau dibelanjakan bertambah. Bumi dan seisinya tunduk kepada orang berilmu."
(Al- Ghazali).

Situasi Pandemi Covid berpengaruh langsung pada keberlangsungan pendidikan anak, tidak terkecuali Paud. Pendidikan Anak Usia Dini turut terkena dampak juga. Anak-anak sesuai dengan kategori usianya yang seharusnya hari-harinya diisi dengan pembiasaan edukatif dalam mempersiapkan diri mengenal lingkungan, berlatih bersosialisasi, dan mengembangkan kemampuan berpikir, berbahasa, dan berolah rasa dalam emosi yang proporsional, sekarang harus menunggu di rumah dalam rutinitas keluarga yang cenderung membosankan. Main game dengan gadget dan menonton siaran televisi yang menuntut pendampingan dan pengawasan yang ekstra ketat. Maka situasi ini cukup mencekam bagi dunia pendidikan anak usia dini. Kita berharap Pandemi Covid-19 ini akan segera berakhir dengan masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan pemerintah pusat menyelesaikan percepatan penanganan Covid-19 ini secara profesional dan proporsional pula.

Tentu Covid juga menerpa lembaga pendidikan Seskoad baik keluarga maupun kesatuan. Kita ketahui bahwa jumlah penderita Covid meningkat tajam, rumah sakit penuh, Bandung dan Jakarta termasuk wilayah zona merah hitam. Di Seskoad sendiri terdapat beberapa anggota organik dan keluarga yang terkena Covid-19 dan diisolasi di mess dan tempat khusus yang disiapkan bagi para penderita. Bagi anggota keluarga yang menderita sakit kronis dan rawan terhadap Covid-19 slalu dianjurkan untuk menjaga kesehatannya. Pemberlakuan protokol kesehatan tentu ditempuh untuk mencegah menularnya Covid-19 bagi teman sekerja maupun personel lainnya.



Uploaded by: Pensekoad

Memperhatikan situasi yang sedang berkembang khususnya ancaman terhadap penyebaran Covid-19 di lingkungan Seskoad, dan keprihatinan terhadap dinamika dan masa depan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ketua Persit KCK PCBS Seskoad memasukkan program renovasi Sekolah Paud Seskoad agar menjadi lebih memadai untuk keberlangsungan proses belajar-mengajar ketika pertemuan tatap muka dan pendidikan PAUD bisa dioperasionalkan kembali. Selain program organisasi Persit yang relatif sangat terbatas untuk dilaksanakan juga dipandang cukup mendesak untuk segera dilakukan renovasi bangunan fisik beserta sarana prasarana, apalagi kondisi memungkinkan karena tidak adanya operasional pendidikan. Latar belakang itulah yang mewarnai upaya mulia Ketua dan segenap Pengurus Persit KCK PCBS Seskoad.

Yang lebih substantif dan krusial lagi bahwa pendidikan anak usia dini membutuhkan campur tangan decision maker pimpinan, khususnya Persit yang senantiasa peduli terhadap masalah pendidikan keluarga sebagai tiang kualitas SDM dan masa depan anak-anak prajurit, PNS TNI AD beserta keluarganya. Masa usia dini sangat menentukan sebagai anak dalam mengembangkan potensinya. Tentu ini semua terlepas dari kompleksitas masalah pendidikan PAUD yang masih terjadi, mulai belum adanya kurikulum yang berlaku secara nasional, jalur nonformal lebih dominan sebagai penyelenggara, terbatasnya kualitas para pendidik, terbatasnya sarana prasarana yang memadai, sampai dengan kenyataan tingginya angka bagi anak usia PAUD yang belum terlayani untuk pendidikan anak usia dini.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak usia 0-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan SDM, sesuai dengan Pasal 28 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD telah ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis formal PAUD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan Sistem Pendidikan Nasional, walaupun kita sadari bahwa pendidikan prasekolah bukan merupakan kewajiban untuk memasuki sekolah dasar. PAUD meletakkan suatu dasar pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir), daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual,

sosial emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi sesuai dengan kategori dan tahap perkembangan anak pada usia dini.



Uploaded by: Penseskoad

Tujuan pendidikan adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, mengetahui hal-hal yang dibutuhkan anak yang bermanfaat bagi perkembangan hidupnya, dapat memberikan stimulasi pada anak, mampu mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai dengan keadaan dan kemampuannya, mengetahui bagaimana

membimbing proses belajar anak pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhannya, dan menaruh harapan dan tuntutan anak secara realistik.

Terlebih pada zaman yang serba modern, maka pendidikan sudah seharusnya ditanamkan kepada anak sejak usia sedini mungkin. Hal tersebut untuk mengimbangi semakin ketatnya persaingan satu sama lain dan dalam upaya menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Maka komitmen dan tekad yang kuat dari seluruh jajaran Persit KCK PCBS Seskoad dengan mendukung sepenuhnya program Indonesia pintar melalui peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan keluarga TNI. Peran aktif dalam turut serta meningkatkan kesejahteraan keluarga TNI, dapat terwujud karena adanya kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap aspek yang menjadi fokus perhatian TNI selama ini yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia prajurit TNI beserta keluarganya.

Hal ini menuntut seluruh pengurus dan anggota Persit di semua level bahu-membahu untuk mewujudkan program yang telah dicanangkan dalam tindakan nyata melalui optimalisasi peran dan fungsi di semua strata organisasi dari tingkat pusat hingga cabang, agar keberadaan organisasi benar-benar secara langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi keluarga prajurit TNI di mana pun berada. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga, melalui peningkatan pendidikan, pengasuhan, dan pendampingan terhadap putera-puteri kita, guna mewujudkan generasi penerus yang berkualitas.

Permasalahan mendasar dalam Pendidikan Paud itulah yang berusaha dijembatani dan dijawab oleh Persit KCK PCBS Seskoad dalam mengembangkan visi misinya mendukung tugas pokok TNI beserta keluarganya, dan turut peduli terhadap pendidikan anak usia dini bagi keluarga besar TNI. Komitmen Seskoad dalam menjawab permasalahan dan tantangan tersebut telah berhasil diwujudnyatakan dalam renovasi bangunan fisik dan melengkapi sarana prasarana pendidikan Sekolah Paud Seskoad.

Kondisi semula bangunan utama hanya 3 ruangan (1 ruang guru 2 ruang kelas), sekarang diubah menjadi 3 kelas dan 1 ruang guru. Satu ruang di beranda luar disekat menjadi dua, sehingga menjadi 5 ruang kelas. Atap bangunan lama yang sudah bocor dimakan usia diganti sekaligus ditinggikan dindingnya agar lebih luas dan sirkulasi udara memungkinkan tercukupinya oksigen untuk ruangan. Selanjutnya perbaikan kamar mandi menjadi permanen, dengan dilengkapi wastafel, penggabungan atap lama dengan atap arena bermain, serta dilakukan revitalisasi arena bermain anak (*outdoor*) dan taman sekaligus penutupan dinding agar tampak rapih dan asri.



Uploaded by: Penseskoad

Sekarang telah berdiri dengan tegak nan kokoh untaian bangunan gedung sekolah yang semoga secara representatif mampu menampung dan mengemban amanat mulia pendidikan anak usia dini di lingkungan Seskoad dan sekitarnya secara profesional dan proporsional. Kita menyadari bahwa lingkungan dan bangunan fisik secara kasat mata sangat berpengaruh bagi keberlangsungan proses belajar-mengajar itu sendiri, dengan didukung pamong dan para pendidik yang kualivaid, dan dalam supervisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Bandung diharapkan Pasca Pandemi Covid-19 kita punya harapan cerah untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar PAUD secara maksimal. Itulah harapan dan dream kita dalam sedikit membantu pendidikan di lingkungan kita.

Persit terpanggil membenahi secara proporsional sekolah PAUD Seskoad, karena kita sangat optimis pada saatnya situasi normal kewajiban kita akan pendidikan Paud harus tetap ditegakkokohkan dan diemban secara tulus ikhlas oleh segenap pihak termasuk Ketua Persit sebagai *decision maker* pengambilan keputusan penyiapan sarana prasarana, tenaga kependidikan, dan keberlangsungan pendidikan anak-anak kita.

Pembentukan karakter pribadi seseorang ditentukan oleh faktor heridas (keturunan) seperti halnya bakat dan tingkat intelektual, juga oleh faktor empiris (pengaruh lingkungan) berupa pendidikan informal di keluarga maupun formal berupa sekolah. Kita mengenal tri pusat pendidikan yakni pendidikan informal (lingkungan keluarga), pendidikan formal (lingkungan sekolah), dan pendidikan non formal (lingkungan masyarakat). Kualitas pendidikan, termasuk terutama di lingkungan keluarga TNI berkaitan langsung dengan aspek sosial budaya masyarakat Indonesia dalam arti luas. Pengaruh empiris/lingkungan berupa pendidikan akan meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan kita. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Integritas pribadi dan karakter pribadi sosok ayah dan ibu di rumah sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak-anak kita.

Kualitas pendidikan di keluarga ditentukan oleh situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari, seperti halnya ketiaatan beribadah sesuai agama yang dianutnya, kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga, ikatan batin dan semangat kekeluargaan yang kokoh, mensyukuri nikmat dan menerima apa adanya dengan sabar dan tawakal, serta memahami tugas pokok suami sebagai prajurit TNI. Yang tertanam adalah kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ) yang baik. Demikianlah betapa pentingnya peranan pendidikan di lingkungan keluarga.

Yang harus dilakukan Persit adalah untuk selalu menggelorakan kepedulian sosial dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga besar TNI dalam rangka Indonesia Pintar, yang

dimulai dari adanya keteladanan di lingkungan keluarga sendiri, lingkungan organisasi, dan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Kita menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan baik pendidikan keluarga maupun pendidikan formal di sekolah termasuk PAUD, menjadi faktor utama dalam mencetak manusia-manusia berkualitas dan berkapasitas, sehingga memiliki keunggulan komparatif yang tinggi.

Pendidikan anak usia dini harus menjadi komitmen kita bersama, peduli masa depan bangsa, gangguan gadget dan arus media sosial yang tanpa batas anak dipaksa lebih cepat dewasa, perlu intervensi campur tangan pendidikan formal dan penanaman budi pekerti luhur. Satu manfaat besar dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di keluarga dan sekolah, adalah mampu meningkatkan harkat martabat keluarga, meningkatkan kesejahteraan dalam arti meningkatkan penghasilan keluarga dan hidup berkecukupan, mampu hidup mandiri, mampu mengatasi keterbatasan kekayaan materi, dan lain-lain. Harta dan warisan akan habis, tetapi pendidikan adalah warisan pengetahuan dan kemampuan yang dapat diperbaharui dan tidak pernah akan habis, mampu memberikan solusi bagi setiap masalah yang muncul.



Uploaded by: Pensekoad

Seskoad akhirnya tidak hanya mendidik para perwira siswa calon Komandan dan Staf di jajaran TNI AD, tetapi juga memiliki sekolah PAUD yang menyiapkan generasi muda yang gilang-gemilang. Lihat anak-anak kita sorot matanya tajam mengejar mimpi yang tergantung tinggi di pojok langit.



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

ISSN 2086-9312



9772086931295